



2019

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

KANTOR SEKRETARIAT

Gd. Graha Mandiri Lt. 18,
Jl. Imam Bonjol No.61
Jakarta Pusat 10310

Telepon : (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829
Email : sekretariat@aspi-indonesia.or.id
Fax : (62-21) 230 0393



**“Mendorong Transformasi Digital
dalam Sistem Pembayaran Indonesia”**

*“Driving Digital Transformation
in the Indonesian Payment System”*



Kata Pengantar

Foreword

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga laporan tahunan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ini, disajikan untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan kegiatan organisasi, serta memberikan gambaran singkat mengenai rencana kegiatan ASPI di tahun 2020. Laporan ini juga mencakup laporan keuangan ASPI per 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, certified public accountant dengan opini audit: Wajar, dalam semua hal yang material.

Demikian kami sampaikan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Sekretariat ASPI

Gd. Graha Mandiri Lt. 18

Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat 10310

Telp: (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829

Fax: (62-21) 230 0393

Email: sekretariat@aspi-indonesia.or.id

Website: <https://www.aspi-indonesia.or.id/>

We give our thanks to God, because of His grace and guidance so that this annual report can be completed accordingly.

The Indonesian Payment System Association (ASPI) Annual report, ended on 31 December 2019, was presented to provide information on the performance and activities of the organization, as well as to provide a brief overview of ASPI activity plan for the year 2020. The report also includes ASPI financial statement as of December 31, 2019, which has been audited by Public Accounting Firm Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, Certified Public Accountant with an audit opinion: Reasonable, in all material matters.

Thus we convey.

For further information, please contact:

ASPI Sekretariat

Gd. Graha Mandiri Lt. 18

Jl. Imam Bonjol No.61, Central Jakarta 10310

Tel: (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829

Fax: (62-21) 230 0393

Email: sekretariat@aspi-indonesia.or.id

Website: <https://www.aspi-indonesia.or.id/>





❖ Kata Pengantar	<i>Introduction</i>	2
❖ Daftar Isi	<i>Table of Contents</i>	3
❖ Kinerja ASPI 2019	<i>ASPI 2019 Performance Highlights</i>	4
❖ Sambutan Badan Pengawas	<i>Supervisory Board Message</i>	7
❖ Laporan Badan Pengurus	<i>Management Report</i>	12
❖ Bab 1: Profil ASPI	<i>Chapter 1: ASPI Profile</i>	16
1.1 Sekilas ASPI	1.1 ASPI At a Glance	
1.2 Visi dan Misi ASPI	1.2 ASPI's Vision and Mission	
1.3 Ruang Lingkup Asosiasi	1.3 Association Scope	
1.4 Profil Badan Pengawas	1.4 Supervisory Board's Profile	
1.5 Profil Badan Pengurus	1.5 Management Profile	
1.6 Pelaksana Operasional	1.6 Operation Executives	
❖ Bab 2: Perkembangan Organisasi	<i>Chapter 2: Organizational Development</i>	27
❖ Bab 3: Laporan Kegiatan ASPI Tahun 2019	<i>Chapter 3: ASPI 2019 Activity Report</i>	33
❖ Bab 4: Rencana Kegiatan ASPI 2020	<i>Chapter 4: ASPI 2020 Activity Plan</i>	42
❖ Bab 5: Laporan Keuangan	<i>Chapter 5: Financial Statements</i>	51





Kinerja 2019

PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2019



Keanggotaan Membership



134 Anggota Biasa /
Regular Member

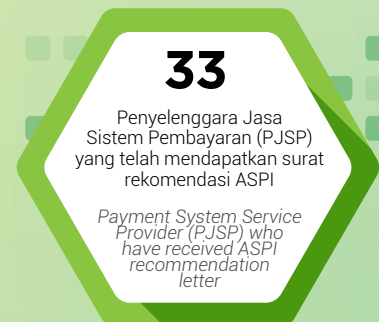
15 Anggota Afiliasi /
Affiliate Member



Sertifikasi NSICCS NSICCS Certification



Surat Rekomendasi QRIS QRIS Letter of Recommendation



QRIS MPM

Mei / May

Soft Launching Quick Response Code Indonesian Standard Merchant Presented Mode (QRIS MPM).

Soft launching Quick Response Code Indonesian Standard Merchant Presented Mode (QRIS MPM).



17 Agustus / August 17

Grand Launching QRIS MPM bertepatan dengan HUT RI ke-74 dengan tagline UNGGUL.

The Grand Launching of QRIS MPM coincided with the 74th Indonesian Independence Day with UNGGUL tagline.



November

Pra User Acceptance Test QRIS CPM, merupakan tahap persiapan User Acceptance Test berupa skenario uji transaksi menggunakan QRIS CPM. Dilanjutkan pelaksanaan User Acceptance Test atau uji coba transaksi menggunakan spesifikasi QRIS CPM dan spesifikasi untuk pembayaran Pull Payment.

QRIS CPM Pre-User Acceptance Test, is the preparation phase of the User Acceptance Test in the form of a transaction test scenario using the QRIS CPM. Followed by the implementation of the User Acceptance Test or trial transactions using the QRIS CPM specification and specifications for Pull Payment payments.

Akhir November-Awal Desember 2019: Pra-Production Trial Run, merupakan tahap persiapan Production Trial Run yang dilanjutkan Production Trial Run. Production Trial Run merupakan tahap uji coba yang dilakukan di environment production sebagai persiapan keterlibatan merchant. Selanjutnya dilakukan Piloting QRIS CPM, uji coba QRIS CPM di beberapa merchant yang telah ditunjuk.

End of November-Early December 2019: Pre-Production Trial Run, is the preparation stage for the Production Trial Run which is continued with the Production Trial Run. The Production Trial Run is a trial phase carried out in a production environment in preparation for merchant involvement. Furthermore, QRIS CPM Piloting was carried out, QRIS CPM trials were conducted at several designated merchants.



Jejak Langkah | Milestones

2019



16 Agustus / August 16

Penerbitan PADG No.21/18/ PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Issuance of PADG No.21 / 18 / PADG / 2019 concerning the Implementation of the Quick Response Code National Standard for Payment.



QRIS CPM

Oktober / October

Proof of Concept QRIS Customer Presented Mode (CPM), yaitu tahap uji coba QRIS CPM di beberapa Perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Pada tahap ini merupakan awal dari pembuktian draft spesifikasi QRIS CPM.

Proof of Concept QRIS Consumer Presented Mode (CPM), which is the trial phase of QRIS CPM in Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). This phase is the beginning of the draft on QRIS CPM specification



Desember / December

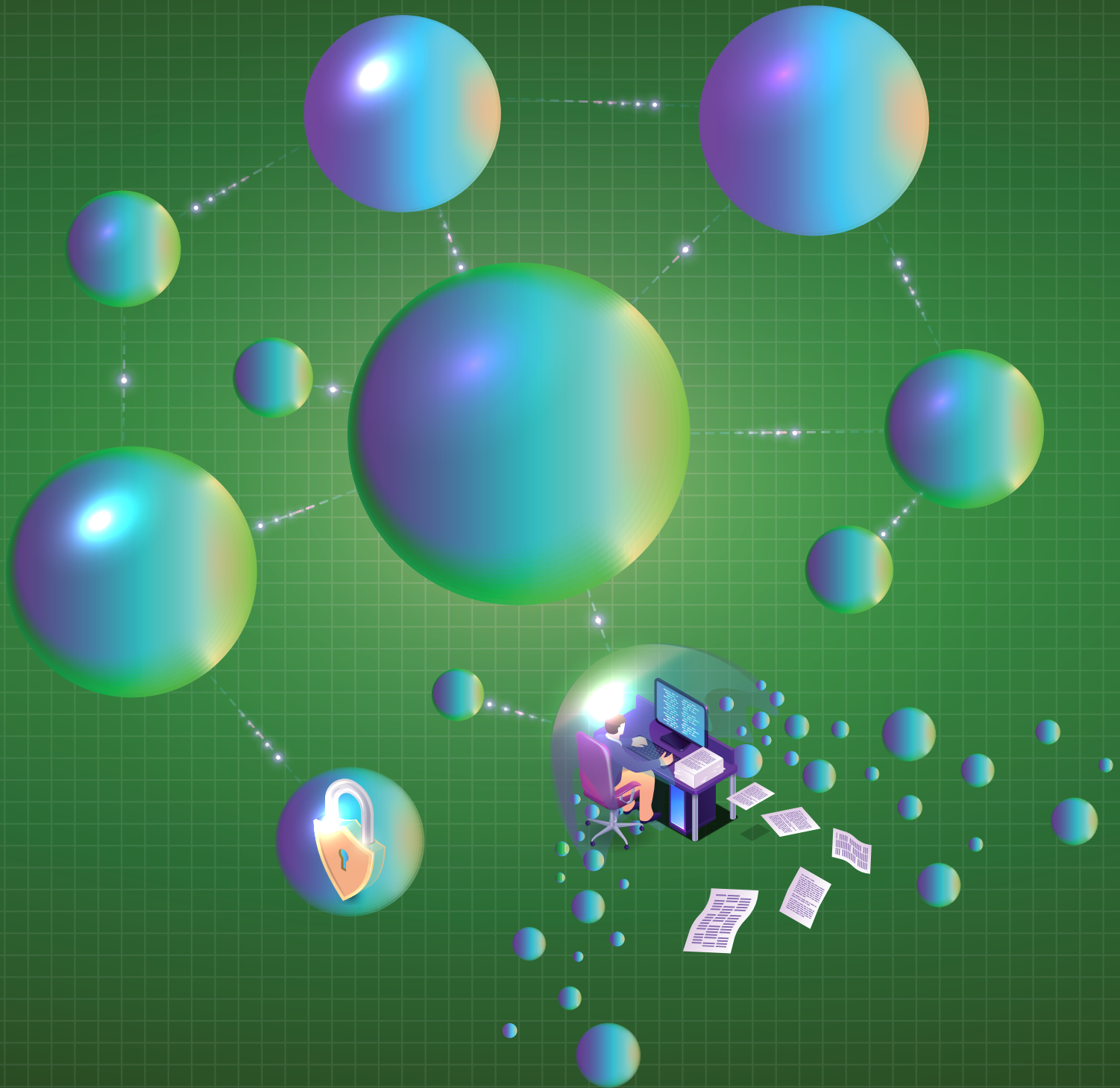
Production Trial Run, merupakan tahap uji coba yang dilakukan di environment production sebagai persiapan keterlibatan merchant. Selanjutnya dilakukan Piloting QRIS CPM, uji coba QRIS CPM di beberapa merchant yang telah ditunjuk.

Production Trial Run, a trial stage conducted in environment production as a preparation for merchant involvement. Further piloting QRIS CPM is conducted at some designated merchant.



Laporan Manajemen

Management Report



Laporan Badan Pengawas

The Board of Supervisors' Report

Kartika Wirjoatmodjo

Ketua Badan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Bapak dan Ibu perwakilan Anggota ASPI yang kami hormati,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami laporkan bahwa Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah berhasil melewati tahun 2019 dengan baik dengan terlaksananya berbagai program dan inisiatif yang mendukung kemajuan sistem pembayaran nasional menuju era digitalisasi

Bersama Laporan Tahunan ini, kami akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan Badan Pengawas terhadap kinerja ASPI dalam tahun 2019.

Kinerja Badan Pengurus

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019, Badan Pengawas berpendapat bahwa Badan Pengurus telah memberikan kinerja yang optimal dalam mencapai target utama ASPI. Berbagai tugas telah dijalankan dengan baik dan kami menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pengurus selaras dengan pandangan Badan Pengawas dan juga sejalan dengan program Bank Indonesia.

Pencapaian ASPI

Sejalan dengan arahan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia berbasis digital, ASPI telah Menyusun standar spesifikasi untuk pembayaran berbasis teknologi Quick Response Code atau lebih dikenal dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan metode Merchant Presented Mode (MPM). Dengan menggunakan standar ini, seluruh pelaku dan penyedia sistem pembayaran di Indonesia yang menggunakan teknologi QR Code dapat

Respected Ladies and Gentlemen, representative of ASPI members.

With give thanks to God all Mighty, we would like to report that Indonesian Payment System Association (ASPI) went through the year 2019 well by delivering various programs and initiatives which support the progression of national payment system to the digital era.

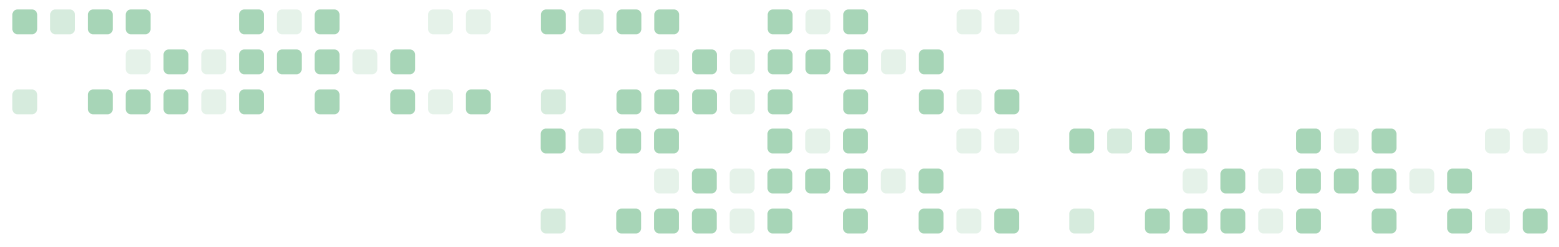
With this Annual Report, we would like to share the execution of the oversight role by the Supervisory Board on ASPI performance in 2019.

Performance of the Management Board

Based on the oversight carried out throughout 2019, the Supervisory Board is in the opinion that the Management Board has delivered its optimum performance to achieve ASPI's main target. Various tasks have been well executed and we are in the view that the steps executed by the Management Board are in line with the view of the Supervisory Board and align with Bank Indonesia's program.

ASPI's achievements

Along with the direction from government to grow digital based economy, ASPI established standard specification for Quick Respond Code technology base, which is also known as Quick Response Indonesian Standard (QRIS) with Merchant Presented Mode (MPM). With this standard, all players and service providers in Indonesia who are using QR Code technology can be integrated and interconnected which



saling terintegrasi dan saling terkoneksi. Teknologi tersebut pada akhirnya akan memberikan kenyamanan, kemudahan dan efisiensi yang lebih tinggi bagi masyarakat pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran. Standar Spesifikasi QRIS MPM ini telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional, dan secara resmi di luncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019.

Lebih jauh ASPI juga telah mendukung setiap usaha untuk memperkenalkan dan mempromosikan QRIS, diantaranya ASPI telah mensponsori dan mengorganisasikan kampanye penggunaan QRIS yang bertemakan "Satu QRIS untuk Semua Pembayaran" dan dilakukan secara serentak oleh seluruh anggota ASPI .

Regulatory & Rules

Berkenaan dengan tugas regulatory, pada Maret 2019, ASPI telah menerbitkan Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI) tentang Kegiatan Transfer Dana Antar Peserta Melalui Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (RTGS), ketentuan yang mengatur hal-hal yang bersifat mikro dan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas peraturan Bank Indonesia. Beberapa ketentuan ASPI lainnya telah diproses pada tahun pelaporan dan diharapkan akan diberlakukan di tahun 2020, termasuk KASPI mengenai *Liability Shift*.

Kami menilai ASPI juga telah turut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai pertemuan dengan Bank Indonesia serta memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan dalam penerapan kebijakan Bank Indonesia.

Kartu Nasional Berlogo GPN

Penggunaan kartu ATM dan/atau debit berlogo nasional, GPN menunjukkan kemandirian dan keunggulan sistem pembayaran Indonesia. Oleh karena itu Penerbit sedapat mungkin diharapkan lebih banyak menggunakan kartu GPN. Sehubungan dengan hal ini, di tahun 2019 kembali ASPI secara berkesinambungan memberikan persetujuan kepada 24 Penerbit untuk permohonan penerbitan kartu nasional berlogo GPN

Untuk menyosialisasikan penggunaan kartu nasional berlogo GPN, ASPI bersama-sama dengan Bank Indonesia dan anggota ASPI

eventually will provide comfort, convenience, and better efficiency for the society who perform payment transaction. Specification Standard QRIS MPM has been set by Bank Indonesia as national standard, and has been formally launched on 17 August 2019.

Furthermore, ASPI also supported every effort to introduce and to promoted QRIS, among which is to sponsor and organize QRIS campaign using the theme "One QRIS for all Payments" which was executed simultaneously by all ASPI members.

Regulatory and Rules

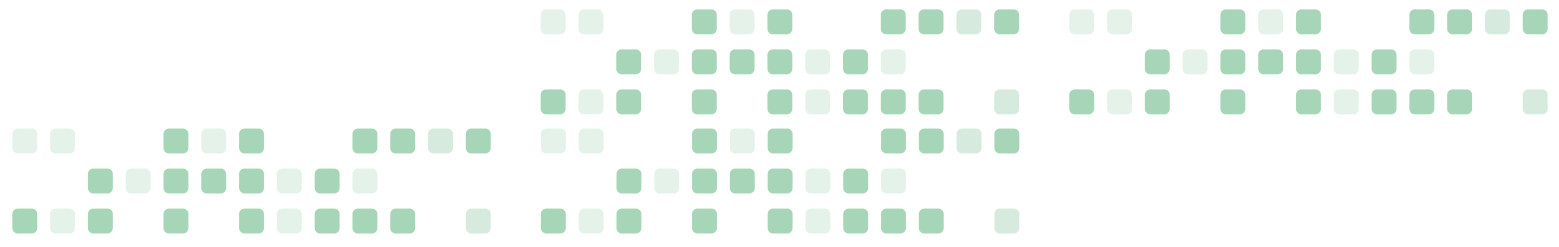
With regards to the regulatory role, in March 2019, ASPI issued Indonesian Payment System Association Rules (KASPI) on Fund Transfer between members through Bank Indonesia system – Real Time Gross Settlement (RTGS), the rules that regulate micro and technical issues, which is the further elaboration on Bank Indonesia regulation. Some of other ASPI Rules are in the pipeline and expected to be rolled out in 2020, including KASPI Liability Shift.

We also have been actively participating in all meetings with Bank Indonesia as well as providing the assistance and support needed for the implementation of Bank Indonesia policy.

National Cards with GPN logo

The utilization of ATM and/or debit card with national logo GPN shows the autonomy and superiority in payment system in Indonesia, therefore issuers are expected to use more GPN cards. In relation to this, in 2019 ASPI endorsed 24 issuers for their request for national cards with GPN logo.

To socialize the utilization of national cards with GPN logo, ASPI, together with Bank Indonesia and its members conducted Merchant Gathering Program in 10 cities in Indonesia, which are Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, Yogyakarta, and



mengadakan program "Merchant Gathering" ke 10 (sepuluh) kota di Indonesia yaitu Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, Yogyakarta, serta Balikpapan dan mendapat sambutan yang menggembirakan.

Perubahan Susunan Badan Pengawas dan Pengurus

Pada tahun 2019, telah terjadi perubahan komposisi Badan Pengawas dan Badan Pengurus ASPI di mana melalui Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 27 Juni 2019 telah diangkat 2 (dua) orang anggota Badan Pengawas dan 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus yang baru untuk menggantikan anggota yang mengundurkan diri. Berikut adalah perubahan susunan Badan Pengawas dan Badan Pengurus:

- Mengangkat Bapak Abdullah Firman Wibowo dan Bapak Supriyatno sebagai anggota Badan Pengawas.
- Pengangkatan Bapak Soejanto sebagai Wakil Bendahara menggantikan Ibu Dian Fithri Fadila Fachrudin dan Bapak Eddy Hadiyanto sebagai ketua Komite 4 menggantikan Bapak Nizarwan Nawas, serta Bapak YB Hariantono sebagai ketua Komite 6 menggantikan Bapak Ery Punta Hendraswara.

Rencana ke Depan 2020

Dengan perkembangan industri pembayaran yang semakin dinamis, ASPI diharapkan senantiasa siap dengan berbagai strategi dan upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang sehingga kerja keras dan kinerja baik yang telah dicapai di tahun ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Bank Indonesia telah mempublikasikan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI) yang berorientasi pada pembangunan ekosistem yang sehat untuk perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia, disamping itu BSPI 2025 juga memberikan arah pengembangan industri sistem pembayaran nasional ke depannya. Oleh karena itu, ASPI diharapkan mampu menyelaraskan program kerja ASPI sesuai dengan BSPI tersebut. Penguatan sistem, infrastruktur serta human capital dapat menjadi amunisi untuk menghadapi tantangan di tahun mendatang.

Balikpapan and received good response.

Changes in the supervisory Board Composition

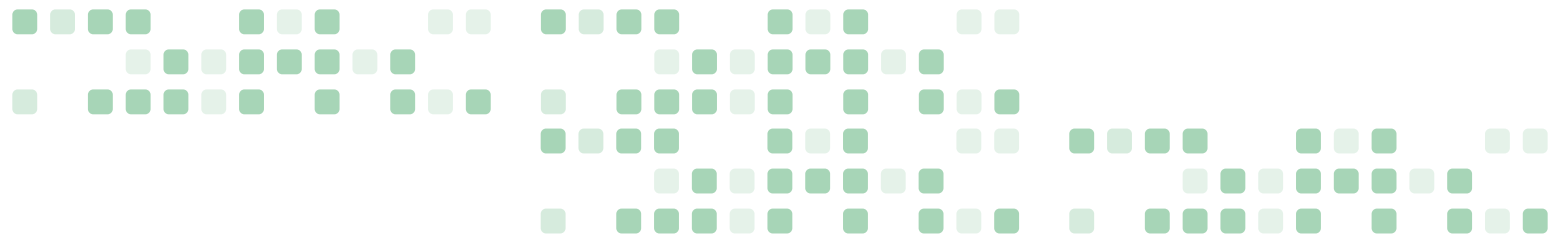
In 2019, there were changes in the ASPI Supervisory Board and Management compositions through the Members General Meeting (RUA) on 27 June 2019. In the RUA, 2 (two) new members of the Supervisory Board were appointed and 3 (three) new members of the Management replaces the previous member who resigned. Following are the changes in the composition of the Supervisory Board and the Management Board

- *The appointment of Mr. Abdullah Firman Wibowo and Mr. Supriyatno as members of the Supervisor Board.*
- *The appointment of Mr. Soejanto as Deputy Treasurer replacing Ms. Dian Fithri Fadila Fachrudin, Mr. Eddy Hadiyanto as Committee 4 Chairman replacing Mr. Nizarwan Nawas, and Mr. YB Hariantono as Committee 6 Chairman replacing Mr. Ery Punta Hendraswara.*

Future Plan 2020

With the development of payment system which becoming more dynamic, ASPI is expected to be ready with various strategies and efforts to face the challenges in the future so that all the hard work and good performance which have been achieved this year can be maintained and further enhanced.

Bank Indonesia has published Indonesian Payment System 2025 Blueprint (BSPI) which is ecosystem development oriented which is healthy for the development of economy and digital finance in Indonesia, beside that BSPI 2025 also provides direction for growing national payment system industry in the future, therefore, ASPI is expected to align ASPI's work program with the BSPI. Strengthen the system, infrastructure, as well as human capital can become the ammunition to face the challenges in the coming years.



Penutup dan Apresiasi

Atas nama Badan Pengawas, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pengurus serta tim operasional ASPI atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan atas terlaksananya program-program kerja ASPI. Semoga ASPI dapat terus mengawal kemajuan sistem pembayaran nasional serta mendukung pelaksanaan inisiatif Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Closing and Appreciation

On behalf of the Supervisory Board, we would like to express our deepest gratitude to the Management Board and ASPI Operations team for all the hard work and dedication to implement ASPI work programs. Hopefully ASPI can continue to oversee the progress of the national payment system and to support the execution of the Indonesia Payment System roadmap 2025.

Jakarta, Maret 2020 / Jakarta, March 2020



Kartika Wirjoatmodjo
Ketua Badan Pengawas / Chairman of Supervisory Board

Anggoro Eko Cahyo

Ketua Umum
Chairman

Para Anggota ASPI yang kami hormati,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya, sehingga ASPI senantiasa dimampukan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan membuahkan hasil yang memberikan nilai tambah dan membanggakan kita semua, serta menjadi landasan bagi ASPI untuk tumbuh berkelanjutan sesuai dengan peran ASPI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), dan penyelenggara Lembaga Standar Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Atas nama Badan Pengurus ASPI perkenankan kami menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Badan Pengurus atas pengelolaan ASPI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, dengan opini wajar.

Sesuai dengan peran ASPI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), dan Lembaga Standar Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), secara garis besar Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus ASPI mencakup lima (5) aspek strategis dan operasional, yakni:

1. Peran ASPI Sebagai Penyelenggara Lembaga Standar Sistem Pembayaran Nasional.
2. Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Standar Nasional Sistem Pembayaran
3. Perumusan dan Penerbitan Ketentuan ASPI (KASPI)
4. Perkembangan Keanggotaan
5. Pengelolaan Keuangan ASPI
6. Penyusunan Rencana Strategis ASPI 2020-2025 Sebagai Respon Kolaborasi Industri Terhadap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia.

Penjelasan mengenai aspek strategis dan operasional tersebut di atas yang telah diselesaikan ASPI dengan baik dengan dukungan penuh anggota ASPI dan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

To the honourable ASPI Members,

First of all, let us wish our gratitude to God all mighty for His grace, that ASPI was able to perform its duties and responsibilities well, and deliver achievements that give added value which made us all proud and becoming the base for ASPI to grow sustainably in accordance to the role of ASPI as the Self Regulatory Organization (SRO), and the standard governing body for National Payment Gateway (GPN).

On behalf of the ASPI Board of Management, let us share the performance report on how the Board of Management runs ASPI for the fiscal year ended 31 December 2019, along with the financial report which has been audited by Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & partners, with the opinion: Normal.

In accordance to ASPI's role as a Self-Regulatory Organization (SRO) and the Standard Institution for National Payment Gateway (GPN), in essence, the performance report of ASPI's Board of Management covers five (5) strategic access and operations which are :

1. ASPI's role as the organizer of the standard institution in the National Payment Systems.
2. Socialization and Education on the use of National Payment System Standard
3. Formulating and issuing ASPI Rules
4. Development of membership
5. Financial Management of ASPI
6. Organizing ASPI 2020-2025 Strategic Plan as Collaboration of Industry Response towards Indonesian Payment System Blueprint (BSPI) 2025.

Explanation about strategic and operational aspects mentioned above which were completed by ASPI well, with the full support from ASPI members and Bank Indonesia are as the following:

1. Peran ASPI Sebagai Penyelenggara Lembaga Standar Sistem Pembayaran Nasional

a. Penyusunan dan Pengujian Standar Teknologi QR Code QRIS.

ASPI telah menyelesaikan penyusunan, pengujian dan implementasi Standar Teknologi QRIS Nasional berdasarkan kebutuhan industri sistem pembayaran nasional, standar best practice EMV QR Code Specification, regulasi Bank Indonesia, dan inovasi ASPI bersama pelaku industri (anggota ASPI) dalam Working Group ASPI – Bank Indonesia. Kualitas teknis dan prinsip inklusivitas penyelenggara standar QRIS telah diakui oleh berbagai negara sebagai yang terdepan dibandingkan dengan standar QR Code yang telah lebih dahulu ada.

b. Penetapan dan Peluncuran Standar QRIS oleh Bank Indonesia.

Standar QRIS tersebut telah diusulkan kepada Bank Indonesia dan ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai spesifikasi standar pembayaran berteknologi QR Code "QRIS" – untuk use case Merchant Presented Mode (MPM) melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 21/2/KEP.GBI/2019. Peluncuran standar teknologi QRIS telah dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjiyo bersamaan dengan perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 pada tanggal 17 Agustus 2019 di Bank Indonesia.

c. Penerbitan Surat Rekomendasi Penggunaan standar QRIS.

Untuk mendukung kesiapan penyelenggara terkait penggunaan standar QRIS MPM, ASPI telah mengeluarkan 33 surat rekomendasi kepada penyelenggara. Penyelenggara wajib melakukan pengujian untuk memastikan kesesuaian sistem penyelenggara dengan spesifikasi standar QRIS MPM. Pada akhir tahun 2019, Bank Indonesia telah menerbitkan izin penggunaan standar QRIS kepada 30 penyelenggara jasa sistem pembayaran.

d. Standar QRIS Customer Presented Mode (CPM)

ASPI juga telah menyelesaikan pengembangan dan pengujian QRIS tahap berikutnya yaitu standar QRIS dengan metode/use case CPM, dan ditargetkan untuk mulai diimplementasikan secara nasional pada kuartal IV tahun 2020.

e. Pelaksanaan Penyelenggara Standar Nasional Kartu ATM/Debit Berbasis Teknologi Chip (NSICCS)

Sesuai dengan peran ASPI sebagai lembaga standar yang salah satu tugasnya adalah mengelola standar kartu ATM/Debit berbasis teknologi chip (NSICCS), ASPI telah melakukan sertifikasi produk kartu dan terminal. ASPI telah mengeluarkan 64 sertifikat kepada pemasok produk kartu, terminal dan penerbit (untuk perso kartu).

1. ASPI role as the organizer of Institution Standard in the National Payment System

a. Organizing and Testing QR Code Standard Technology QRIS.

ASPI has finalized the set up, test, and implementation of the national standard technology QRIS based on the national payment system industry needs, standard EMV QR Code Specification best practice, Bank Indonesia Regulations, and ASPI's innovation as market players (ASPI Members) included in the ASPI Working group – Bank Indonesia. Technical quality and the inclusivity principle of QRIS standards that are acknowledged by various nations as the leading, compared to the standard QR Code that has existed before.

b. Establishment and Launching of the QRIS Standard by Bank Indonesia.

The QRIS standard has been proposed to Bank Indonesia and stipulated by Bank Indonesia as a standard specification for payment using QR Code "QRIS" technology - for Merchant Presented Mode (MPM) method through the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 21/2 / KEP.GBI / 2019. The launch of the QRIS technology standard was led by the Governor of Bank Indonesia, Mr. Perry Warjiyo in conjunction with the celebration of the 74th Independence Day of the Republic of Indonesia on 17 August 2019 at Bank Indonesia.

d. Issuance of Recommendation Letter for the Use of QRIS standard.

To support the preparation of the service providers in applying QRIS MPM standard, ASPI has issued 33 letters of recommendations to the service providers. Service providers are obliged to carry out tests to ensure the conformity of the service provider's system with the QRIS MPM standard specifications. By the end of 2019, Bank Indonesia has issued licenses for the use of QRIS standard to 30 payment system service providers.

d. Customer Presented Mode (CPM) QRIS Standard

ASPI has also completed the development and testing of the next stage of QRIS, namely the QRIS standard with CPM use case method, and is targeted to be implemented nationally in the fourth quarter of 2020.

e. Implementation of National Standard for Chip Technology-Based ATM / Debit Cards (NSICCS)

In relation to ASPI's role as an institution in which one of its tasks is to manage chip technology-based ATM / Debit card (NSICCS) standards, ASPI has certified card and terminal products. ASPI has issued 64 certificates to card product suppliers, terminals and issuers (for card personalisation).

Terkait migrasi kartu chip oleh industri perbankan berdasarkan regulasi Bank Indonesia yang mewajibkan penerapan Standar Nasional Teknologi Chip secara bertahap mulai 1 Juli 2017, ASPI telah melakukan pemantauan pelaksanaan ketentuan tersebut, khususnya mengenai kepatuhan penerbitan kartu ATM/debet dengan standar NSICCS. Hingga akhir 2019, jumlah kartu ATM/debet NSICCS yang diterbitkan telah mencapai 90,6 juta kartu atau 57% dari jumlah kartu ATM/debet yang beredar, dan melampaui kewajiban minimal 50% penerbitan kartu ATM/debet per 31 Desember 2019.

Regarding the migration of chip cards by the banking industry based on Bank Indonesia regulations which mandates gradual implementation of National Chip Technology Standards starting 1 July 2017, ASPI has monitored the implementation of these provisions, particularly regarding the compliance of ATM / debit card issuance with NSICCS standard. By the end of 2019, the number of NSICCS ATM / debit cards issued had reached 90.6 million cards or 57% of the total number of ATM / debit cards in circulation, and had exceeded the minimum obligation of 50% issuance as of 31 December 2019.

2. Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Standar Nasional Sistem Pembayaran

Dalam peran sebagai SRO Sistem Pembayaran dan Lembaga Standar, ASPI telah bertindak sebagai penyelenggara dan sponsor program secara nasional untuk memperkenalkan dan mendorong masyarakat menggunakan QRIS dengan tema: "Satu QRIS untuk Semua Pembayaran", dengan dukungan anggota ASPI sebagai penyelenggara QRIS.

2. Socialization and Education on the Use of National Payment System Standards

In its role as SRO for Payment System and Standard Agency, ASPI has acted as the organizer and sponsor of the national program to introduce and encourage the public to use QRIS with the theme: "One QRIS for All Payments", with the support of ASPI members as QRIS organizers.

ASPI juga melaksanakan kegiatan kampanye penggunaan kartu ATM/Debet GPN berbasis teknologi chip yang didukung anggota ASPI dalam program "Merchant Gathering" di 10 kota yang diadakan oleh Bank Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendorong penggunaan kartu GPN di merchant seluruh Indonesia. Sedangkan Penerbitan kartu berlogo GPN sampai akhir 2019 telah mencapai 55,3 juta kartu (35% dari kartu beredar).

ASPI also conducted a campaign for the use of chip technology-based NPG ATM / Debit cards supported by ASPI members in the "Merchant Gathering" program in 10 cities held by Bank Indonesia. This program aims to encourage GPN card users in merchants around Indonesia. However, the card issuance with the GPN logo until the end of 2019 has reached 55.3 million cards (35% from cards in circulation).



3. Penyusunan dan Penerbitan Ketentuan ASPI (KASPI)

Dalam menjalankan perannya sebagai SRO, ASPI telah menerbitkan ketentuan yang bersifat mikro teknis dalam bentuk Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI) tentang Kegiatan Transfer Dana Antar Peserta Melalui Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (RTGS) pada tanggal 15 Maret 2019.

3. Establishing and Issuing ASPI Rules

In carrying out its role as an SRO, ASPI has issued rules that are micro-technical in the form of the Indonesian Payment System Association Rules (KASPI) concerning Fund Transfer Activities between Participants through the Bank Indonesia System - Real Time Gross Settlement (RTGS) on March 15, 2019.

KASPI merupakan ketentuan teknis operasional yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia, kondisi

KASPI is an operational technical set of rules that refers to Bank Indonesia regulations, industry

dan best practice industri, serta dapat secara cepat disesuaikan oleh ASPI sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi pasar. Beberapa Ketentuan ASPI lainnya yang sedang dalam proses persetujuan Bank Indonesia adalah Ketentuan Mengenai Liability Shift dan Penanganan Transaksi Fraud.

4. Perkembangan Keanggotaan

Pada akhir tahun 2019, jumlah anggota ASPI meningkat 6,4% dari tahun 2018 menjadi 149 anggota. Sebagian dari anggota baru tersebut adalah perusahaan selain bank dan fintech, yang mencerminkan kolaborasi erat industri perbankan, perusahaan selain bank dan fintech sesuai dengan perkembangan teknologi pembayaran digital dan visi bersama meningkatkan inklusivitas finansial dan perekonomian Indonesia.

5. Pengelolaan Keuangan ASPI

Dari segi keuangan, ASPI membukukan pendapatan sebesar Rp22,3 miliar, relatif sedikit di atas pendapatan tahun 2018 sebesar Rp22,1 miliar. Sumber utama pendapatan berasal dari alokasi MDR fees dan iuran keanggotaan. Sedangkan untuk pengeluaran, terdapat penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2018, disebabkan pembayaran biaya pengembangan standar NSICCS sebesar Rp14,8 miliar yang dibukukan dalam tahun 2018, dan pengelolaan pengeluaran berdasarkan prinsip kemandirian, profesional dan efisiensi secara berkelanjutan sepanjang tahun 2019.

6. Penyusunan Rencana Strategis ASPI 2020-2025 Sebagai Respon Kolaborasi Industri Terhadap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia

Sesuai dengan peran ASPI sebagai SRO, Voice of Industry, dan Strategic Partner Bank Indonesia yang semakin strategis dan bertambah luas ruang lingkupnya dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia untuk akselerasi ekosistem pembayaran digital dan inklusivitas ekonomi, ASPI telah membangun fondasi strategis sebagai berikut:

- a. Badan Pengurus ASPI telah menyusun Rencana Strategis ASPI 2020-2025 dan dibantu oleh konsultan internasional independent PricewaterhouseCoopers (PwC), sesuai dengan kebutuhan/aspirasi industri sistem pembayaran nasional, global leading practices, dan tata kelola industri yang baik. Rencana Strategis ASPI tersebut telah dipresentasikan kepada Bank Indonesia dalam rangka menciptakan sinergi dan akselerasi pencapaian visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia sesuai tata kelola industri yang baik.
- b. Penguatan Organisasi dan Tata Kelola ASPI Secara Berkesinambungan. Berdasarkan Rencana Strategis ASPI 2020-2025 tersebut dan BSPI 2025 Bank

conditions and best practices, and can be quickly adjusted by ASPI in accordance with technological developments and market conditions. Several other ASPI rules that are currently in the process of approval are the provisions concerning Liability Shift and Fraud Transaction Handling.

4. Membership Growth

At the end of 2019, the number of ASPI members increased by 6.4% from 2018 to 149 members. Some of these new members are companies other than banks and fintech, reflecting the close collaboration of the banking industry, institution other than banks and fintech in accordance with developments in digital payment technology and a shared vision of increasing financial inclusiveness and the Indonesian economy.

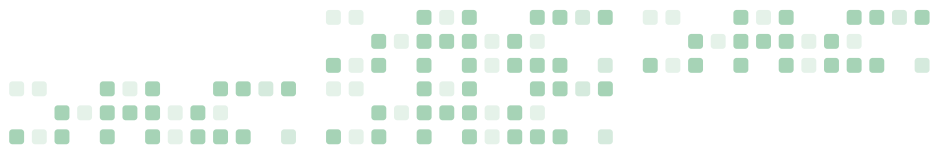
5. ASPI Financial Management

From a financial perspective, ASPI posted revenue of IDR 22.3 billion, which is slightly above the revenue of IDR 22.1 billion during 2018. The main source of income came from the allocation of MDR fees and membership fees. As for expenditures, there was a significant decrease compared to that of 2018, due to the payment of NSICCS standard development costs of IDR 14.8 billion recorded in 2018, and management of expenditures based on the principles of independence, professionalism and efficiency in a sustainable manner throughout 2019.

6. Preparation of the 2020-2025 ASPI Strategic Plan as an Industry Collaboration Response to the 2025 Indonesian Payment System Blueprint (BSPI) of Bank Indonesia

In accordance with the role of ASPI as SRO, Voice of Industry, and Strategic Partner of Bank Indonesia which is increasingly strategic and has a wider scope in supporting Bank Indonesia's policy to accelerate the digital payment ecosystem and economic inclusiveness, ASPI has built the following strategic foundations:

- a. The ASPI Management Board has prepared the ASPI Strategic Plan 2020-2025 and is assisted by an independent international consultant PricewaterhouseCoopers (PwC), in accordance with the needs / aspirations of the national payment system industry, global leading practices, and good industrial governance. The ASPI Strategic Plan was presented to Bank Indonesia in the context of creating synergy and accelerating the achievement of the vision Bank Indonesia Payment System Blueprint (BSPI) 2025 in accordance with good industrial governance.
- b. Continuous Strengthening of ASPI Organization and Governance. Based on the Strategic Plan of ASPI 2020-2025 and BSPI 2025 of Bank Indonesia, ASPI



Indonesia, ASPI telah meletakkan landasan strategis bagi penguatan fungsi, fokus dan prioritas struktur organisasi dan tata kelola organisasi ASPI. Termasuk dalam hal ini, proses penguatan kapasitas Komite ASPI yang akan menjadi bagian integral dan mitra strategis Working Group Bank Indonesia – ASPI/Industri berdasarkan 5 (lima) inisiatif strategis Bank Indonesia: Open Banking, Sistem Pembayaran Retail, Infrastruktur Pasar Keuangan, Data, dan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan.

Apresiasi dan Penutup

Saya mewakili Badan Pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota ASPI atas segenap kerjasama, dukungan dan kontribusi yang memungkinkan pencapaian optimal program ASPI selama tahun 2019.

Penghargaan serupa juga kami sampaikan kepada Tim Pelaksana Operasional ASPI atas segenap kerja keras dan dedikasi dalam melaksanakan program ASPI dan melayani kebutuhan anggota segenap ASPI sesuai tata kelola industri yang baik.

Badan Pengurus juga menyampaikan penghargaan kepada Badan Pengawas ASPI atas arahan dan pengawasan kepada Badan Pengurus, sehingga ASPI mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja pada tahun 2019.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Bank Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada ASPI, dan dukungan penuh dalam memperkuat peran ASPI sebagai SRO dan mitra strategis Bank Indonesia. ASPI berkomitmen penuh untuk terus mendukung pencapaian visi Bank Indonesia guna mewujudkan sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, aman, dan andal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para anggota dan masyarakat Indonesia.

has laid a strategic foundation for strengthening the functions, focus and priorities of ASPI's organizational structure and organizational governance. Included in this is the process of strengthening the capacity of the ASPI Committees which will become an integral part and strategic partner of the Bank Indonesia - ASPI / Industry Working Group based on 5 (five) strategic initiatives of Bank Indonesia: Open Banking, Retail Payment Systems, Financial Market Infrastructure, Data, and Regulation, Licensing and Supervision.

Appreciation and Closing

I, on behalf of the Board of Management express our deepest gratitude to all ASPI members for all the cooperation, support, and contribution which makes possible to reach optimum achievement on ASPI's programs throughout 2019.

We also express the same gratitude to ASPI Operations team for all the hard work and dedication in executing ASPI program and to support the needs of ASPI with good governance.

The Board of Management also express our gratitude to the Board of Supervisory for the guidance and oversights to the Board of Management so that ASPI can increase its capacity and performance in 2019

We thank you and appreciate to Bank Indonesia for trusting ASPI, and full support in strengthening ASPI role as SRO and Bank Indonesia's strategic partner. ASPI is fully committed to continue supporting the achievement of Bank Indonesia vision to create national payment system which is efficient, fast, secure, and reliable to give the added value to the members and public.

Jakarta, Maret 2020 / Jakarta, March 2020

Anggoro Eko Cahyo
Ketua Umum / Chairman

Profil ASPI

ASPI Profile





Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ("Asosiasi") atau ASPI yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM No. 10 tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 28 Oktober 2011.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri sistem pembayaran, dibutuhkan ketentuan/peraturan yang tepat, cepat dan mampu mengakomodir perkembangan terkini dari penyelenggaraan sistem pembayaran dari berbagai sisi baik bisnis maupun teknis. Di satu sisi, Bank Indonesia selaku otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara menyeluruh di Indonesia, sementara disisi lain, pihak industri memiliki kompetensi terkait dengan aspek mikro dan teknis penyelenggaraan sistem pembayaran yang diantaranya teknologi informasi dan infrastruktur.

Untuk mendukung terciptanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal, industri sistem pembayaran sebagai pihak yang lebih memahami kebutuhan dan kepentingan pasar, perlu berperan aktif. Peran aktif tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk suatu organisasi yang merepresentasikan seluruh pelaku sistem pembayaran dan menjadi mitra Bank Indonesia dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur, menjaga kelancaran, dan mengembangkan sistem pembayaran.

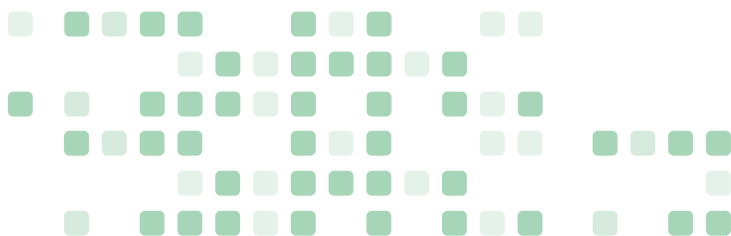
Organisasi ini memiliki peran, tugas dan fungsi dalam lingkup mikro dan teknis untuk membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mewadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia. Peran, tugas dan fungsi yang dimiliki organisasi untuk mengeluarkan ketentuan tersebut didasarkan pada kesepakatan, amanat dan mandat dari pelaku sistem pembayaran yang menjadi anggota organisasi.

The Indonesian Payment System Association or ASPI established in Jakarta based on the Notarial Deed of DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM No. 10 dated October 20, 2010 in South Jakarta and was approved by all ASPI members in the Members General Meeting (RUA) on October 28, 2011.

Along with the development of technology in the payment system industry, the right rules and regulation which can accommodate the latest development in payment system from various aspects, both business and technicality-wise are required. On one hand, Bank Indonesia as the authority in the payment system has the authority to regulate and maintain the smooth operation of the payment system as a whole in Indonesia, while on the other hand, the industry has competence related to the micro and technical aspects of the payment system implementation including information technology and infrastructure.

To support the creation of an efficient, fast, secure, and reliable payment system, the payment system industry as the party that better understands market needs, should play an active role. This active role can be realized by forming an organization that represents all the players in the payment system and becoming a partner of Bank Indonesia in realizing the objectives of Bank Indonesia in carrying out the tasks of regulating, maintaining smooth operation, and developing the payment system.

This organization has the roles, responsibilities, and function in the technical and micro environment to establish rules in the payment industry which to cover various changes but remain to be align with Bank Indonesia regulation. The role, responsibilities, and functions of the organization to issue these rules are based on the agreement, direction, and mandate of the player of payment system who are members of the organization.





Visi dan Misi ASPI

ASPI Vision and Mission



VISI VISION

Visi: Meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan andal.

Vision: Increase the role of payment system players in Indonesia in realizing a more efficient, secure, and reliable payment system industry.

MISI MISSION

01

Menjadi *Self Regulatory Organization* dalam membangun sistem pembayaran nasional yang independen dan terpercaya.
Become a Self-Regulatory Organization in building an independent and reliable national payment system.

02

Menjadi mitra profesional bagi Bank Indonesia.
Become a professional partner for Bank Indonesia.

03

Menjadi wadah aspirasi bagi industri sistem pembayaran nasional.
Become a platform of aspirations for the national payment system industry.

04

Menyusun ketentuan mikro dan teknis sistem pembayaran nasional.
Organizing the micro and technical rules of the national payment system.

05

Berperan aktif dalam percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia
Actively involved in the accelerations of digitalization in the payment system in Indonesia





Meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, andal dan menyusun ketentuan yang bersifat mikro dan teknis dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

To enhance the role of payment system players in Indonesia to accomplish a payment system industry that is more efficient, secure, reliable and to establish micro and technical rules in the payment system.

Wadah bagi kepentingan segenap pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang terkait dengan hubungan antar anggota ASPI maupun hubungan ASPI dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.

A platform for the interests of all payment system providers in Indonesia operating the payment system, both related to the relationship between ASPI members and ASPI's relationship with Bank Indonesia and other relevant authorities;

Mitra Bank Indonesia dalam mengatur, mengembangkan, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran guna mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal.

Bank Indonesia partners in regulating, developing, and maintaining a smooth payment system to create an efficient, fast, secure, and reliable payment system.





Profil Badan Pengawas *Supervisory Board Profile*



Diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas ASPI yang mewakili Perhimpunan Bank-Bank Nasional (PERBANAS) untuk periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai Wakil Menteri di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk periode 2016 – Oktober 2019, sebagai Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero), Tbk periode 2015 – 2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2014 – 2015, dan Presiden Direktur dan CEO di Indonesia Infrastructure Finance periode 2011 - 2013. Beliau meraih gelar MBA dari Erasmus University, Rotterdam pada tahun 2001. Selain itu beliau juga memiliki sertifikasi program Refreshment untuk Sertifikasi Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017 dan sertifikasi Manajemen Risiko level 5 dari lembaga yang sama pada tahun 2015.

Appointed as ASPI Supervisory Board Chairman representing the National Banks Association (PERBANAS) period 2019 - 2022. He served as Deputy Minister at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).

In his career, he served as the President Director of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk throughout the period of 2016 - October 2019, as Finance & Strategy Director of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk throughout 2015-2016 period, Chief Executive and Member of the Board of Commissioners at the Guarantor Institution Deposit (LPS) throughout for the period 2014 - 2015, and President Director and CEO of Indonesia Infrastructure Finance throughout 2011 - 2013. He earned an MBA from Erasmus University, Rotterdam in 2001. In addition, he also earned a Refreshment program certification for Risk Management Certification from the Institute Banking Professional Certification (LSPP) in 2017 and level 5 Risk Management certification from the same institution in 2015.

Kartika Wirjoatmodjo
Ketua | Chairman



Merupakan anggota ASPI yang mewakili Perkumpulan Bank-Bank Asing Indonesia (PERBINA) periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai CEO Citibank N.A Indonesia. Dalam perjalanan karirnya di Citi, pernah menjabat sebagai CEO untuk Citi Filipina dan Citi Regional Head untuk Filipina dan Guam periode 2013 – 2015, sebagai CEO Citi Hungaria periode 2007 - 2013 dan Regional Head untuk 12 negara Eropa Timur lainnya periode 2008 – 2013. Beliau meraih gelar Bachelors of Science dari Case Western Reserve University pada tahun 1983, gelar MSc dari Steven's Institute of Technology pada tahun 1984, serta gelar MBA dari St John's University pada tahun 1988.

Is a member of ASPI representing the Indonesian Foreign Banks Association (PERBINA) for the period 2019 - 2022. He currently serves as CEO of Citibank N.A Indonesia. Throughout his career in Citi, he served as CEO for Citi Philippines and Citi Regional Head for the Philippines and Guam for the period 2013-2015, as CEO of Citi Hungary in the period 2007-2013 and Regional Head for 12 other Eastern European countries in the period 2008-2013. a Bachelors of Science from Case Western Reserve University in 1983, an MSc from Steven's Institute of Technology in 1984, and an MBA from St. John's University in 1988.

Batara Sianturi
Anggota | Member



Diangkat sebagai anggota Badan Pengawas untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank BNI Syariah sejak 2017. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Head of Subsidiaries Company BNI pada tahun 2016, sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Business Risk PT Bank BNI pada tahun 2015, sebagai Head of International Division BNI pada tahun 2011, sebagai Head of Treasury Division BNI pada tahun 2010, dan sebagai GM BNI Tokyo periode 2008 – 2010. Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1988, gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1989, dan mengambil program Doktorat dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2007. Selain itu juga aktif menjadi narasumber public lecturer di berbagai Universitas serta menjadi assessor untuk sertifikasi Manajemen Risiko level 5.

Appointed as a member of Supervisory Board for the period 2019 - 2022. He has served as President Director of PT Bank BNI Syariah since 2017. Throughout his career, he served as Head of Subsidiaries Company BNI in 2016, as Senior Executive Vice President (SEVP) of PT Business Risk Bank BNI in 2015, as Head of BNI International Division in 2011, as Head of BNI Treasury Division in 2010, and as GM BNI Tokyo in the period 2008 - 2010. He earned his Bachelor of Agriculture degree from Gajah Mada University, Yogyakarta, in 1988, his Master of Management from Gajah Mada University, Yogyakarta, in 1989, and took his Doctoral program from Padjadjaran University, Bandung in 2007. In addition, he is also an active public lecturer resource at various universities and an assessor for Level 5 Risk Management certification.

Abdullah Firman Wibowo
Anggota | Member



Diangkat sebagai anggota Badan Pengawas untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jateng. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 – 2017 dan sebagai Direktur Utama Bank BPD DIY periode 2008 – 2014. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari University of Dallas, USA Jurusan International Management pada tahun 1991 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2000.

Appointed as a member of Supervisory Board for the period 2019 - 2022. He served as Director of the Bank of Central Java. Throughout his career, he served as the Director of Bank of Central Java in the period 2014 - 2017 and as the Managing Director of Bank BPD DIY in the period 2008 - 2014. He earned a Master of Business Administration from the University of Dallas, USA Department of International Management in 1991 and a Doctor of Science degree Management Economics from Gajah Mada University, Yogyakarta in 2000.

Supriyatno
Anggota | Member



Merupakan anggota ASPI yang mewakili Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero). Dalam perjalanannya karirnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mutiara, Tbk periode November Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Diponegoro pada tahun 1981 dan gelar Magister bidang studi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ekonomi IPWI pada tahun 1998.

Is a member of ASPI representing the State Owned Bank Association (HIMBARA) for the period 2019-2022. He serves as the President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero). In his career, he served as President Director of PT Bank Mutiara, Tbk in the November period. He earned a Bachelor's degree from Diponegoro University in 1981 and a Master degree in Management studies from IPWI College of Economics in 1998.

H. Maryono
Anggota | Member



Profil Badan Pengurus *Management Profile*



Anggoro Eko Cahyo **Ketua Umum | *Chairman***

Diangkat sebagai Ketua Umum untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Dalam perjalanan karirnya di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan periode 2018 – 2019 dan sebagai Direktur Konsumer Banking periode 2015 – 2018. Beliau meraih gelar Insinyur Bidang Teknik dan Manajemen Industri dari Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1992 dan gelar Master Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002.

Appointed as the Chairman for the period 2019 - 2022. He served as Director of Finance at PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Throughout his career in PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, he served as Finance Director for 2018 - 2019 and as Consumer Banking Director for 2015 - 2018. He earned an Engineering and Industrial Management from the Indonesian Institute of Technology in 1992 and Master of Agribusiness from the Bogor Institute of Agriculture in 2002.



Rico Usthavia Frans **Wakil Ketua Umum | *Deputy of Chairman***

Merupakan Wakil Ketua Umum untuk periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dalam perjalanan karirnya di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, pernah menjabat sebagai Direktur IT periode 2018 – sekarang, sebagai Direktur Digital Banking & Technology periode 2016 – 2018, dan sebagai SEVP Transaction Banking periode 2013 – 2016. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992.

He is the Deputy of Chairman for the period 2019 - 2022. He served as Director of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Throughout his career in PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, he served as IT Director in 2018 - present, as Director of Digital Banking & Technology in 2016 - 2018, and as SEVP Transaction Banking in 2013 - 2016. He earned a Bachelor of Electrical Engineering from the Institute of Technology Bandung in 1992.



Handayani **Sekretaris Jenderal | *Secretary General***

Diangkat sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Konsumer di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode April 2016 – Oktober 2017, dan sebagai Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk periode Desember 2014 – April 2016. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2001.

Appointed as Secretary General for period 2019 - 2022. She served as Consumer Director of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Throughout her career, she served as Consumer Director at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk from April 2016 - October 2017, and as Director of Commerce at PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk from December 2014 - April 2016. She earned her Master of Management from Padjadjaran University in 2001.



Abraham Josef Adriaansz
Wakil Sekretaris Jenderal | Deputy of Secretary General

Merupakan Wakil Sekretaris Jenderal untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Corporate Strategy & Development PT Rintis Sejahtera serta aktif sebagai Ketua Asian Payment Network (APN) periode 2017 – 2019. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Head of Finance Services di PricewaterhouseCoopers Consulting periode 1993 – 2002. Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung dan gelar MBA dari Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma, USA.

He is Deputy Secretary General for the period 2019-2022. He served as Director of Corporate Strategy & Development of PT Rintis Sejahtera and was active as Chair of the Asian Payment Network (APN) for the period 2017-2019. Throughout his career, he served as Head of Finance Services at PricewaterhouseCoopers Consulting for the period 1993 - 2002. He earned a Bachelor's degree from the Institute of Technology Bandung and an MBA from Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma, USA.



Sigit Prastowo
Bendahara | Treasurer

Diangkat sebagai Bendahara untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bank DKI. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Plt Direktur Utama PT Bank DKI periode Oktober 2018 – Juli 2019, sebagai Direktur Keuangan PT Bank DKI periode Juni 2015 – Oktober 2018, dan sebagai Senior Vice President Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk periode Maret 2012 – Juni 2015. Beliau meraih gelar Sarjana Geografi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas yang sama pada tahun 1997. Selain itu, beliau juga memiliki Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance dari LSPP & BNSP pada tahun 2019 dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - Cyber Security Awareness In Industry 4.0 dari LSPP pada tahun 2019.

Appointed as Treasurer for the period 2019 - 2022. He served as Finance Director of PT Bank DKI. In his career, he served as Acting President Director of PT Bank DKI in the period October 2018 - July 2019, as Finance Director of PT Bank DKI in the period June 2015 - October 2018, and as Senior Vice President of the Budgeting & Financial Control Division of PT Bank Negara Indonesia (Persero) , Tbk period March 2012 - June 2015. He holds a Bachelor of Geography from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1995 and a Masters in Management from the same University in 1997. In addition, he also has a Treasury Dealer Level Advance Certification from LSPP & BNSP in 2019 and Level 5 Risk Management Certification-Cyber Security Awareness In Industry 4.0 from LSPP in 2019.



Soejanto Soetjijo
Wakil Bendahara | Deputy of Treasurer

Diangkat sebagai Wakil Bendahara untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bank Sinarmas. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Capital Indonesia pada tahun 2013, sebagai Advisor Bank Capital Indonesia pada tahun 2012, dan sebagai Direktur di MNC Finance periode 2004 – 2012.

Appointed as Deputy Treasurer for the period 2019 - 2022. He served as a Director at PT Bank Sinarmas. Throughout his career, he served as President Director of Bank Capital Indonesia in 2013, as Advisor to Bank Capital Indonesia in 2012, and as Director in MNC Finance for the period 2004 - 2012.



Ari Yanuanto Asah
Ketua Komite 1 | Committee 1 Chairman

Merupakan Ketua Komite 1 untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Transformation Project Head di PT Bank Mega, Tbk. Dalam perjalanan karirnya beliau pernah menjabat sebagai Head Of Projects & System Development (Ops) di PT Bank Permata Tbk pada tahun 2010.

He is Committee 1 Chairman for period 2019 - 2022. He has served as the Transformation Project Head of PT Bank Mega, Tbk. Throughout his career, he served as Head of Projects & System Development (Ops) at PT Bank Permata Tbk in 2010.



Djumariah Tenteram
Ketua Komite 3 | Committee 3 Chairman

Merupakan Ketua Komite 3 untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Retail Banking PT Bank Permata, Tbk. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Head of Wealth Management, Retail Liability Products & E-Channels Permata Bank sejak tahun 2013 dan menjabat berbagai posisi penting di Standard Chartered Bank periode 2003 – 2013. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Nommensen, Medan pada tahun 1988.

She is the Committee 3 Chairman for the period 2019 - 2022. She served as Director of Retail Banking of PT Bank Permata, Tbk. Throughout her career, she has served as Head of Wealth Management, Retail Liability Products & E-Channels Permata Bank since 2013 and held various important positions at Standard Chartered Bank for the period 2003 - 2013. She earned her Bachelor of Accounting degree from Nommensen University, Medan in 1988.



Eddy Hadiyanto
Ketua Komite 4 | Committee 4 Chairman

Diangkat sebagai Ketua Komite 4 untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) serta Direktur PT Eka Bakti Amerta Yoga Sejahtera (Penyelenggara Transfer Dana bukan Bank).

Appointed as Committee 4 Chairman for the period 2019 - 2022. He served as Chairman of Association of Indonesian Money Transfer Organizers (APPUI) and Director of PT Eka Bakti Amerta Yoga Sejahtera (Non-Bank Fund Transfers Organizer).



Timothy Utama
Ketua Komite 5 | Committee 5 Chairman

Diangkat sebagai Ketua Komite 5 untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Managing Director, Treasury, and Trade Solutions Citibank N.A Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Chief Operations, and Technology Officer di Singapore Exchange/ SGX periode 2012 – 2016, sebagai Managing Direktur Teknologi dan Operasional Bank Permata, Head of Wholesale Banking Operations Global Shared Service Centre Standard Chartered Bank India, Global Head of Trade Services ANZ Australia dan Head of Global Clients Standard Chartered Bank Singapore. Beliau meraih gelar Bachelor of Business Administration jurusan Akuntansi & Keuangan dari Texas A&M University.

Appointed as Chair of Committee 5 for the period 2019 - 2022. He served as Managing Director, Treasury, and Trade Solutions of Citibank N.A Indonesia. Throughout his career, he has served as Chief Operations, and Technology Officer on the Singapore Exchange / SGX period 2012-2016, as Managing Director of Bank Permata Technology and Operations, Head of Wholesale Banking Operations of the Standard Chartered Bank of India Shared Service Center, Global Head of ANZ Australia Trade Services and Head of Global Clients of Standard Chartered Bank Singapore. He earned a Bachelor of Business Administration majoring in Accounting & Finance from Texas A&M University.



YB Hariantono
Ketua Komite 6 | Committee 6 Chairman

Merupakan Ketua Komite 6 untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Head of Information Technology di PT Bank BTPN, Tbk. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai EVP, IT Head di BII – Maybank periode 2010 – 2014 dan EVP Network Head di Bank Permata periode November 2008 – Maret 2010. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya pada tahun 1990.

He is the Committee 6 Chairman for the period 2019 - 2022. He served as Head of Information Technology at PT Bank BTPN, Tbk. Throughout his career, he served as EVP, IT Head at BII - Maybank for the period 2010 - 2014 and EVP Network Head at Bank Permata from November 2008 - March 2010. He earned a Bachelor of Electrical Engineering from the Ten November Institute of Technology, Surabaya in 1990 .



Santoso Liem
Ketua Komite 7 | Committee 7 Chairman

Merupakan Ketua Komite 7 untuk periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Bank Central Asia, Tbk, aktif dalam kepengurusan Badan Eksekutif AKKI, serta Ketua Bidang Penelitian, Studi & Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Head of Pension Funding BCA di Dana Pensiun BCA periode Juli 2003 – April 2016, sebagai VP Organization Development di Indonesia Marketing Association (IMA) periode Maret 2013 – Maret 2015, sebagai Komisaris di PT Abacus Cash Solution (Anak Perusahaan Dana Pensiun BCA) periode Oktober 2013 – Mei 2016, dan anggota Komite ADPI di Asosiasi Dana Pensiun Indonesia periode Juni 2013 – April 2016. Beliau meraih gelar Magister jurusan Teknologi Industri dari Universitas Trisakti pada tahun 1989.

He is the Committee 7 Chairman for the period 2019 - 2022. He served as Director of PT Bank Central Asia, Tbk, active in the management of the AKKI Executive Board, as well as Chair of Research, Studies & Publications of the Indonesian Bankers Association (IBI). Throughout his career, he has served as the Head of Pension Funding of BCA at the BCA Pension Fund for the period July 2003 - April 2016, as VP of Organization Development in the Indonesia Marketing Association (IMA) from March 2013 - March 2015, as Commissioner at PT Abacus Cash Solution (BCA Pension Fund Subsidiaries) from October 2013 - May 2016, and member of the ADPI Committee at the Indonesian Pension Fund Association from June 2013 - April 2016. He earned a Masters degree in Industrial Technology from Trisakti University in 1989.



Pelaksana Operasional *Operation Executive*



Susiana Suhendra **Direktur Eksekutif | *Executive Director***

Menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASPI untuk menangani Operasional. Mempunyai pengalaman yang ekstensif di perbankan. Dalam perjalanan karirnya di HSBC, beliau pernah menjabat sebagai Senior Vice President & Head of Securities Services, sebelumnya beliau juga pernah mengepalai divisi Financial Institution Group, serta pernah menjabat sebagai komisaris di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

As the Executive Director managing the operational. Having extensive experience in banking. In her career in HSBC, she has served as Senior Vice President & Head of Security Services, previously she lead the Financial Institution Group division, and previously served as a commissioner at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



Pelaksana Operasional *Operation Executive*



Perkembangan Organisasi

Organization Development





Sepanjang tahun 2019, berikut adalah laporan terkait keorganisasian ASPI:

1. Keanggotaan

Hingga akhir Desember 2019, ASPI memiliki 149 anggota terdiri dari institusi dalam bidang perbankan dan non-perbankan seperti Central Depository, perusahaan *financial technology* (*fintech*), prinsipal, *acquirer*, penyelenggara *switching*, serta institusi lainnya yang terkait dalam sistem pembayaran di Indonesia. Keanggotaan ASPI meningkat sebesar 6,4% dari tahun lalu yaitu sebanyak 140 anggota. Berikut adalah institusi yang menjadi anggota ASPI pada tahun 2019:

1. PT BPR Hasa Mitra
2. PT BPR Jawa Timur
3. PT Solusi Pasti Indonesia
4. PT Transaksi Artha Gemilang
5. PT Buana Media Teknologi
6. PT E2Pay Global Utama
7. PT Bluepay Digital International
8. PT BPR Surya Yudhakencana
9. PT BPR Surya Yudha
10. PT Airpay International Indonesia
11. PT Fintek Karya Nusantara
12. PT Bimasakti Multi Sinergi
13. PT Nusa Satu Inti Artha
14. PT Inti Dunia Sukses

Dan dalam periode yang sama telah terjadi penggabungan usaha dan/atau *merger*/akuisisi diantara Anggota ASPI sebagai berikut:

- Bank Agris Tbk, PT Bank Mitra Niaga Tbk, dan Industrial Bank of Korea (IBK) menjadi Industrial Bank of Korea
- Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia menjadi BTPN
- PT Bank Dinar dan Bank Oke Indonesia menjadi PT Bank Oke Indonesia
- Bank Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk menjadi Bank Danamon

Throughout 2019, the following are reports relating to the ASPI organization:

1. Membership

As of the end of December 2019, ASPI had 149 members consisting of institutions in banking and non-banking sectors such as Central Depository, financial technology (fintech) companies, principals, acquirers, switching operators, and other institutions involved in the payment system in Indonesia. ASPI membership increased by 6,4% from last year from 140 members. Following are the institutions that became members of ASPI in 2019:

1. PT BPR Hasa Mitra
2. PT BPR Jawa Timur
3. PT Solusi Pasti Indonesia
4. PT Transaksi Artha Gemilang
5. PT Buana Media Teknologi
6. PT E2Pay Global Utama
7. PT Bluepay Digital International
8. PT BPR Surya Yudhakencana
9. PT BPR Surya Yudha
10. PT Airpay International Indonesia
11. PT Fintek Karya Nusantara
12. PT Bimasakti Multi Sinergi
13. PT Nusa Satu Inti Artha
14. PT Inti Dunia Sukses

And in the same period there has been a business merger and / or merger / acquisition among ASPI Members as follows:

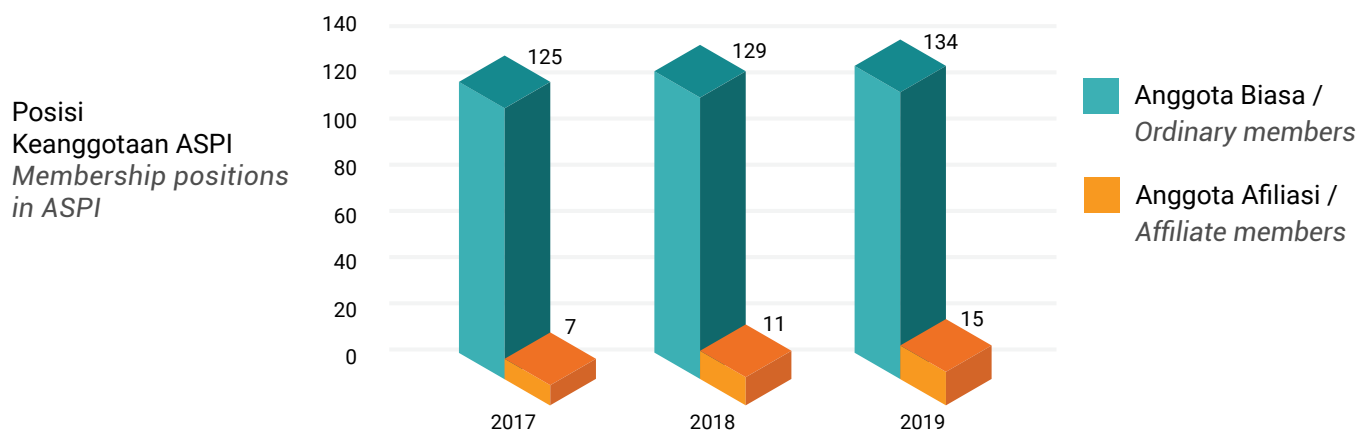
- Bank Agris Tbk, PT Bank Mitra Niaga Tbk, and Industrial Bank of Korea (IBK) became Industrial Bank of Korea
- The National Pension Savings Bank (BTPN) with Bank Sumitomo Mitsui Indonesia became BTPN
- PT Bank Dinar and Bank Oke Indonesia became PT Bank Oke Indonesia
- Bank Danamon with PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk to become Bank Danamon

Berdasarkan posisi keanggotaan dalam ASPI per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- 134 anggota biasa
- 15 anggota afiliasi (tidak memiliki hak suara)

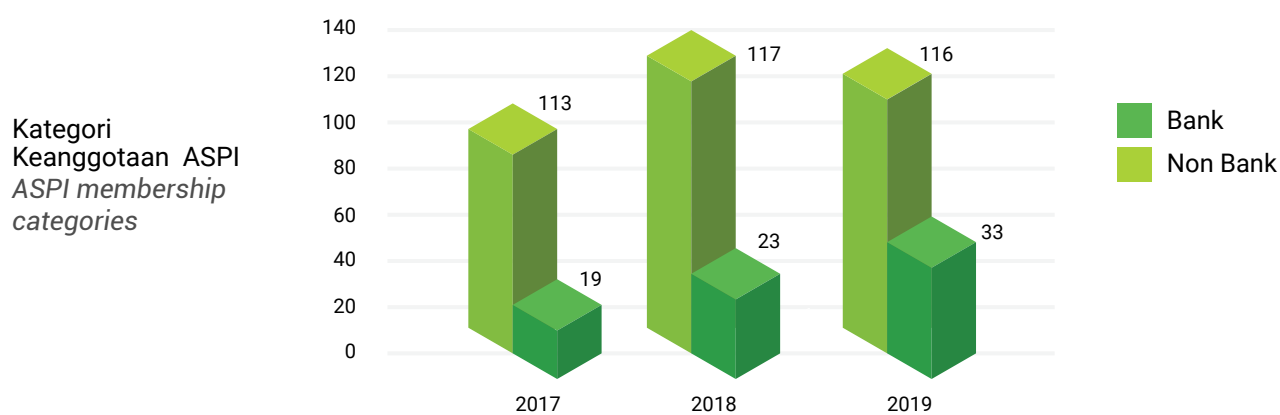
Based on membership positions in ASPI as of December 31, 2019 are as follows:

- 134 ordinary members
- 15 affiliate members (has no voting rights)



Berdasarkan kategori keanggotaan, per 31 Desember 2019 terdapat 116 anggota dengan kategori lembaga perbankan dan 33 anggota dengan kategori lembaga selain Bank

Based on membership categories, as of December 31, 2019 there were 116 members in the banking institution category and 33 members in the category of institutions other than banks.



Dengan rincian keanggotaan kategori Lembaga Perbankan dan Lembaga selain Bank adalah sebagai berikut:

Lembaga Perbankan:

- Bank Umum : 70 institusi
- BPD : 24 institusi
- BPR : 13 institusi
- Bank Syariah : 9 institusi

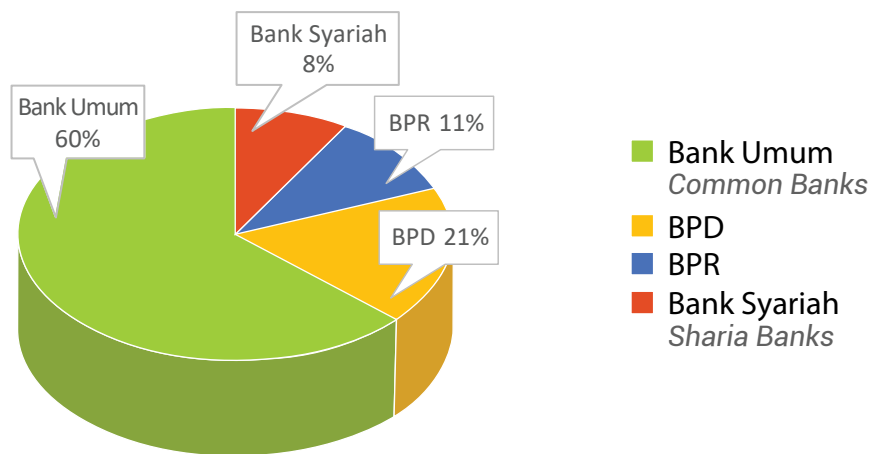
Details of membership in the category of Banking Institutions and Institutions other than Banks are as follows:

Banking Institutions:

- Common Banks : 70 institutions
- BPD : 24 institutions
- BPR : 13 institutions
- Islamic banks : 9 institutions

Komposisi Bank dalam Keanggotaan ASPI

Composition Bank in ASPI Membership



Lembaga selain Bank:

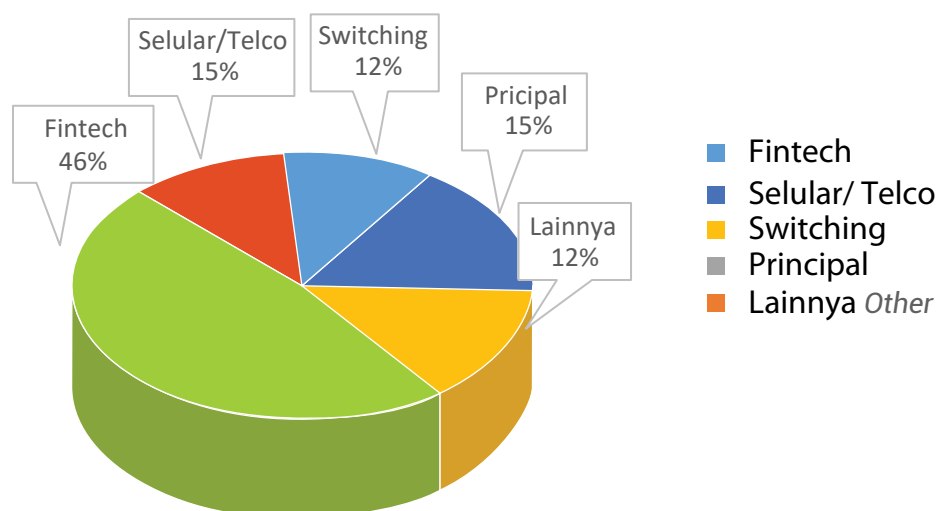
- Fintech : 13 institusi (anggota biasa) dan 2 institusi (anggota afiliasi)
- Principal : 5 institusi
- Selular/ Telco : 5 institusi
- Switching : 4 institusi
- Lainnya : 4 institusi

Institutions other than banks:

- Fintech: 13 institutions (ordinary members) and 2 institutions (affiliated members)
- Principal: 5 institutions
- Cellular / Telco: 5 institutions
- Switching: 4 institutions
- Others: 4 institutions

Komposisi Non Bank dalam Keanggotaan ASPI

Non-Bank Composition in ASPI Membership



2. Kepesertaan Anggota ASPI pada SKN-BI, BI-RTGS, Penerbit Uang Elektronik, dan Penerbit Kartu Kredit

Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2019, jumlah peserta SKN-BI (tidak termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) & Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL)) sebanyak 108 bank, dimana 103 bank diantaranya adalah anggota ASPI.

Untuk jumlah peserta BI-RTGS (tidak termasuk UUS & PKL) tercatat sebanyak 111 institusi (Lembaga perbankan dan lembaga selain bank), dengan rincian 106 institusi merupakan anggota ASPI dan 5 lainnya belum menjadi anggota ASPI.

2. Membership of ASPI Members in SKN-BI, BI-RTGS, ATM / Debit Card Issuers, Electronic Money issuers, and Credit Card Issuers

Based on Bank Indonesia data as of December 2019, the number of SKN-BI participants (not including the Sharia Business Unit (UUS) & Local Clearing Operations (PKL)) is 108 banks, of which 103 banks are ASPI members.

For the number of BI-RTGS participants (not including UUS & PKL), there are 111 institutions (banking institutions and institutions other than banks), with details 106 institutions are ASPI members and 5 others have not yet become ASPI member.

Sedangkan berdasarkan data penerbit kartu yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia yang terdiri dari penerbit kartu ATM dan/ atau Debit, penerbit uang elektronik, dan penerbit kartu kredit, rincian keanggotaan ASPI adalah sebagai berikut:

- Dari 118 penerbit kartu ATM dan/atau kartu debit, 110 adalah anggota ASPI;
- Dari 50 penerbit Uang Elektronik, 41 adalah anggota ASPI;
- Dari 25 penerbit kartu kredit, 24 adalah anggota ASPI.

3. Perubahan Kepengurusan ASPI

Berdasarkan Rapat Umum Anggota (RUA) ASPI pada tanggal 27 Juni 2019 susunan kepengurusan ASPI adalah sebagai berikut :

Meanwhile, based on card issuance data that has obtained permission from Bank Indonesia consisting of ATM and / or Debit card issuers, electronic money issuers, and credit card issuers, ASPI membership details are as follows:

- Of the 118 ATM and / or debit card issuers, 110 are ASPI members;
- Of the 50 Electronic Money issuers, 41 are ASPI members;
- Of the 25 credit card issuers, 24 are ASPI members.

3. ASPI Management Changes

Based on General Meeting of ASPI on 27 June 2019, the management of ASPI are as follow:

Komposisi Badan Pengawas ASPI ASPI Supervisory Board Composition

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Kartika Wirjoatmodjo	Ketua <i>Chairman</i>
Batara Sianturi	Wakil Ketua Umum <i>Deputy of Chairman</i>
Abdullah Firman Wibowo	Anggota <i>Member</i>
Supriyatno	Anggota <i>Member</i>
H. Maryono	Anggota <i>Member</i>

Komposisi Badan Pengurus ASPI ASPI Management Composition

Anggoro Eko Cahyo	Ketua Umum <i>Chairman</i>
Rico Usthavia Frans	Wakil Ketua Umum <i>Deputy of Chairman</i>
Handayani	Sekretaris Jendral <i>Secretary General</i>
Abraham J. Andriaansz	Wakil Sekretaris Jendral <i>Deputy of Secretary General</i>
Sigit Prastowo	Bendahara <i>Treasurer</i>
Soejanto	Wakil Bendahara <i>Deputy of Treasurer</i>
Ari Yanuanta Asah	Ketua Komite 1 <i>Committee Chairman 1</i>
Budiman Tanjung*	Ketua Komite 2 <i>Committee Chairman 2</i>
Djumariah Tenteram	Ketua Komite 3 <i>Committee Chairman 3</i>
Eddy Hadiyanto	Ketua Komite 4 <i>Committee Chairman 4</i>
Timothy Utama	Ketua Komite 5 <i>Committee Chairman 5</i>
YB Hariantono	Ketua Komite 6 <i>Committee Chairman 6</i>
Santoso Liem	Ketua Komite 7 <i>Committee Chairman 7</i>

*menjabat hingga 23 Agustus 2019

Badan Pengawas ASPI 2019

ASPI Supervisory 2019



Badan Pengurus ASPI 2019

ASPI Management 2019



Kegiatan ASPI Tahun 2019 *ASPI Activity* 2019





Laporan Kegiatan ASPI Tahun 2019

ASPI Activity Report 2019



1. Penyusunan Ketentuan

Pada 15 Maret 2019, ASPI melalui Komite 1 sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) yang membidangi kegiatan transfer dana, telah menerbitkan Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI) nomor ASPI/K-I/3/III/2019 tentang Kegiatan Transfer Dana Antar Peserta Melalui Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang mengatur pelaksanaan dalam melakukan transaksi transfer dana elektronik melalui BI-RTGS baik yang dilakukan oleh Peserta untuk diri sendiri maupun transaksi yang dilakukan peserta untuk kepentingan nasabah.

2. Pengembangan QRIS

Sebagai penyelenggara standar, ASPI dengan didukung oleh Bank Indonesia dan pelaku industri telah berhasil Menyusun standar berteknologi QR Code untuk memenuhi kebutuhan industry dan perkembangan teknologi digital.

Dalam tahun pelaporan, ASPI telah melakukan penyerahan spesifikasi QRIS MPM dan Spesifikasi Interkoneksi Push Payment kepada Bank Indonesia. Kedua dokumen tersebut juga dilengkapi dengan pedoman penggunaan spesifikasi QRIS MPM dan Panduan Operasional Harian antar-switching dan penyelesaian transaksinya.

Soft Launching QRIS MPM diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2019 bertepatan dengan acara "Seminar Digital Transformation for Indonesian Economy".

Mengikuti kesuksesan implementasi terbatas tersebut, pada tanggal 17 Agustus 2019 Bank Indonesia menyelenggarakan Grand Launching QRIS MPM yang dilaksanakan pada peringatan HUT RI ke 74 dengan tagline UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung).

1. Provisions Arrangement

On March 15, 2019, ASPI, through Committee 1 as a Self-Regulatory Organization (SRO) in charge of fund transfer activities, issued the Indonesian Payment System Association Provisions (KASPI) number ASPI/KI/3/III/2019 regarding Fund Transfer Activities Between Participants Through Bank Indonesia System - Real Time Gross Settlement which regulates the implementation of conducting electronic fund transfer transactions through BI-RTGS both conducted by Participants for themselves and transactions conducted by participants for the benefit of customers.

2. QRIS Development

As the standard governing institution, ASPI supported by Bank Indonesia and market players managed to implement QR Code Standard Technology to respond to industry needs and development of digital technology.

During the reporting year, ASPI has submitted QRIS MPM specification and Specification for Interconnection Push Payment to Bank Indonesia. Both documents also complemented with the guidelines for using the specification QRIS MPM and guidelines for daily operations between switching companies and also other transaction settlement processes.

QRIS MPM Soft Launching was conducted on 27 May 2019 to coincide with "Seminar Digital Transformation for Indonesian Economy" event.

Following to the above successful limited implementation, on 17 August 2019 Bank Indonesia performed the Grand Launching QRIS MPM during the celebration of the 74th year of independence of Republic of Indonesia with tagline UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung).

Untuk mendorong penggunaan QRIS, Bank Indonesia telah mewajibkan PJSP dengan teknologi QR Code untuk menggunakan standar spesifikasi QRIS mulai 1 Januari 2020

3. QRIS CPM (Consumer Presented Mode) dan Interkoneksi Pull Payment

Mengikuti keberhasilan QRIS MPM, ASPI bersama dengan industri dan didukung oleh Bank Indonesia mulai mengembangkan QRIS dengan metode CPM yang proses pengembangannya dimulai di Kuartal IV 2019. Bersamaan dengan pengembangan QRIS CPM juga dilakukan pengembangan spesifikasi interkoneksi Pull Payment yang merupakan standar interoperabilitas instrument menggunakan QR Code CPM.

4. Sosialisasi and Pelatihan

Untuk memberikan pemahaman mengenai standar / produk yang dikeluarkan, ASPI telah mengadakan sosialisasi dan training kepada para pelaku sistem pembayaran yang terkait dengan standar yang telah dikembangkan.

- **Sosialisasi Standar QRIS MPM**
Sosialisasi Standar QRIS MPM dilakukan per batch, dimulai dari PJSP yang sudah mendapat persetujuan QR Code proprietary sebelumnya untuk segera berubah dan mengikuti standar QRIS. Selain itu juga diadakan sosialisasi dengan Bank Pembangunan Daerah agar dapat mengimplementasikan QRIS secara masif ke UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
- **Training**
Kegiatan ini bersifat lanjutan dan konsultasi dari masing-masing PJSP yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai QRIS MPM yang sudah diimplementasikan.

To drive the utilization of QRIS, Bank Indonesia requires PJSP with QR technology Code to use the standard specification: QRIS, starting 01 January 2020.

3. QRIS CPM (Consumer Presented Mode) and Pull Payment Interconnection

Following the success of QRIS MPM, ASPI together with the payments industry, supported by Bank Indonesia started to develop QRIS with CPM method in which the development process was started in 4th quarter 2019. Along with the development of QRIS CPM, development of Pull Payment interconnectivity specification which is the standard interoperability instrument using QR Code CPM were also developed.

4. Socialization and Training

To provide an understanding of the standards/products issued, ASPI has been conducting socialization and training to the perpetrators of payment systems related to the standards that have been developed.

- **MPM QRIS Standards Socialization**
Socialization of the MPM QRIS Standards is carried out per batch, starting with PJSPs that have received prior proprietary QR Code approval to immediately change and follow the QRIS standard. In addition, socialization was also held with the Regional Development Bank in order to be able to implement QRIS massively to MSMEs that are spread in various regions in Indonesia.
- **Training**
This activity is a follow-up and consultation from each PJSP who wants to learn more about the QRIS MPM that has been implemented.



- Kampanye Kartu GPN

ASPI bersama-sama dengan Bank Indonesia melakukan kampanye kartu GPN dengan kegiatan Merchant Gathering ke 10 kota yaitu Jakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, Yogyakarta dan Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian akan GPN kepada merchants.

- Kampanye QRIS

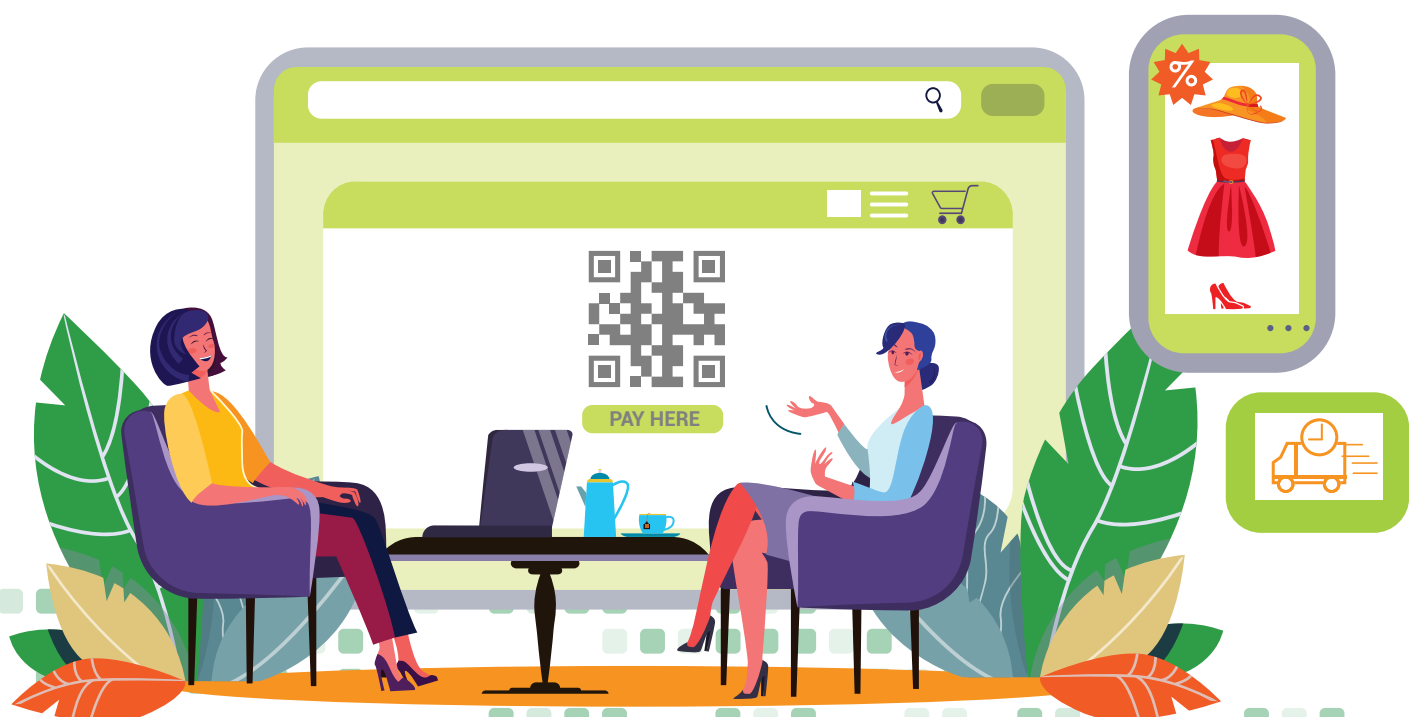
Merupakan kegiatan sosialisasi QRIS, di mana ASPI menyiapkan Key Visual dan video grafis untuk digunakan oleh PJSP saat melakukan kampanye QRIS dalam rangka meningkatkan penggunaan QRIS.

- GPN Card Campaign

ASPI together with Bank Indonesia conducted GPN card campaigns with Merchant Gathering activities to 10 cities, namely Jakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, Yogyakarta, and Balikpapan. This events were intended to enhance the understanding about GPN to the merchants.

- QRIS Campaign

It is a QRIS socialization activity, in which ASPI prepares a Visual Key and graphic video to be used by PJSP when conducting a QRIS campaign to further increase the utilization of QRIS.



SATU **QRIS** UNTUK SELURUH PEMBAYARAN



5. Sertifikasi National Standard for Indonesian Chip Card Specification (NSICCS)

Sepanjang tahun 2019, ASPI telah melakukan sertifikasi NSICCS. Hal tersebut dilakukan guna memastikan vendor kartu, vendor mesin, dan semua aplikasi dapat memenuhi standar nasional. Sepanjang tahun 2019, berikut adalah jenis sertifikasi yang dilakukan oleh ASPI:

Jenis Sertifikasi Certification Type	Jumlah Total
01 Vendor Kartu Card Vendor	5
02 Produk Kartu Card Product	7
03 Vendor ATM ATM Vendor	2
04 Produk ATM Product ATM	3

5. National Standard for Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) certification.

Throughout 2019, ASPI has perform NSICCS certification. This was done to ensure card suppliers, machine suppliers, and all applications can meet national standards. The following are the number of banks, vendors and products that have been certified in 2019:

Jenis Sertifikasi Certification Type	Jumlah Total
05 Vendor EDC EDC Vendor	11
06 Produk EDC EDC Product	12
07 Personalisasi Biro Personalization Bureau	1
08 Bank CPT CPT Bank	42

6. Implementasi QRIS MPM

Sepanjang tahun 2019 Jumlah PJSP yang telah memperoleh spesifikasi QRIS sebanyak 70 PJSP dan 33 PJSP telah mendapatkan Surat Rekomendasi ASPI.

6. Implementation of QRIS MPM

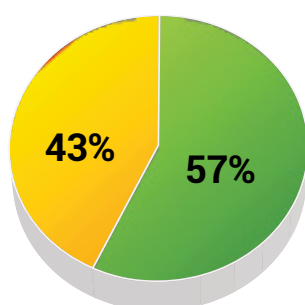
Throughout 2019, the number of PJSPs that have obtained the QRIS specification is 70 PJSPs and 33 PJSPs have received ASPI Recommendations.



7. Implementasi chip NSICCS dan kartu GPN,

ASPI melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerbitan kartu ATM/debet. Pada tahun 2019, jumlah kartu ATM/debet Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) telah mencapai 57% dari kartu ATM/debet yang beredar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar 35,44%. Berikut adalah rincian jumlah kartu ATM/ debet yang beredar:

- Kartu Chip NSICCS : 90.648.707 kartu
- Kartu Magnetik : 68.376.380 kartu



7. Implementation of the NSICCS chip and GPN card.

ASPI monitors the implementation of ATM / debit card issuance. In 2019, the number of National Standard Chip Technology (SNTC) ATM / debit cards has reached 57% of the ATM / debit cards in circulation. These numbers increased from 2018, amounting to 35.44%. The breakdown of ATM / Debit Card in circulation are as follow:

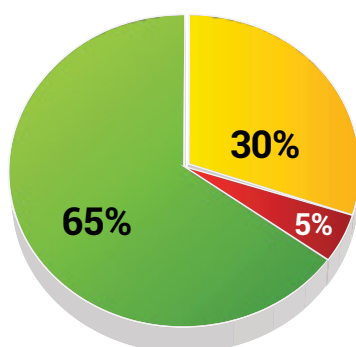
- NSICCS Chip Cards : 90,648,707 cards
- Magnetic Cards : 68,376,380 cards

Kartu NSICCS
NSICCS Card

- Kartu Chip NSICCS
NSICCS Chip Card
- Kartu Magnetik
Magnetic Card

Usaha berkesinambungan juga dilaksanakan oleh ASPI sehubungan dengan penerbitan kartu ATM dan/atau Debet berlogo nasional, GPN. Hingga akhir tahun 2019 terdapat lebih dari 55 juta kartu yang beredar (chip & non chip) dengan logo GPN. Penggunaan kartu berlogo GPN tersebut menunjukkan kemandirian dan keunggulan sistem pembayaran Indonesia. Oleh karena itu Penerbit Indonesia diminta ikut serta mendukung penerbitan kartu GPN.

- Kartu Chip Logo Nasional : 48.105.864 kartu
- Kartu NonChip Logo Nasional : 7.185.741 kartu
- Kartu Tanpa Logo Nasional : 103.733.482 kartu



Continuous efforts has been made by ASPI on the issuance of ATM / Debit card with National logo, GPN. Until end of 2019, more than 55 million cards (chip & non chip) with GPN logo in circulation. The utilization of cards with GPN logo shows the autonomy and superiority of payment system in Indonesia, therefore cards issuers are requested to support the issuance of GPN cards.

- National Logo Chip Card : 48.105.864 cards
- National Logo Non Chip Card : 7.185.741 cards
- Card without National Logo : 103.733.482 cards

Kartu GPN | GPN Card

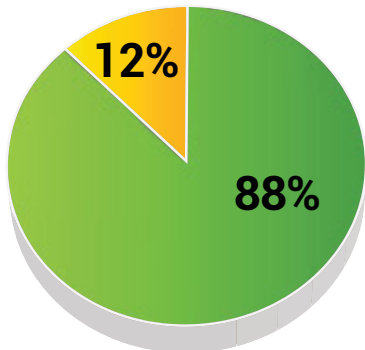
- Kartu Tanpa Logo Nasional
Card without National Logo
- Kartu Chip Logo Nasional
National Logo Chip Card
- Kartu Non Chip Logo Nasional
National Logo Non Chip Card

ASPI juga melakukan pemantauan terhadap ATM siap NSICCS dan ATM Non NSICCS pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- ATM siap NSICCS : 89.207 ATM
- ATM Non NSICCS : 12.020 ATM

ASPI also monitors NSICCS ready ATMs and Non NSICCS ATMs in 2019 with the following details:

- NSICCS ready ATMs: 89,207 ATMs
- Non NSICCS ATMs: 12,020 ATMs



ATM Siap NSICCS
NSICCS Ready ATM

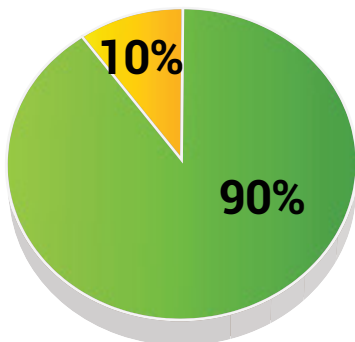
- ATM Siap NSICCS
NSICCS Ready ATM
- ATM Non NSICCS
Non NSICCS ATM

Sedangkan untuk EDC Terminal siap NSICCS dan EDC Terminal Non NSICCS pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- EDC Terminal Siap NSICCS : 1.401.720 EDC Terminal
- EDC Terminal Non NSICCS : 150.323 EDC Terminal

Whereas for EDC Terminals ready for NSICCS and EDC Non NSICCS Terminals in 2019 are as follows:

- NSICCS Ready Terminal EDC: 1,401,720 EDC Terminal
- Non NSICCS EDC Terminals: 150,323 EDC Terminals



EDC Terminal Siap NSICCS
EDC Terminal NSICCS Ready

- EDC Terminal Siap NSICCS
EDC Terminal NSICCS Ready
- EDC Terminal Non NSICCS
EDC Non NSICCS Terminal

8. Kerjasama Dengan Audit Perso Biro

Mulai bulan Oktober 2019, ASPI telah bekerja sama dengan AGES Systems Gelderfarenit Pte Ltd untuk melakukan audit perso biro kartu NSICCS.

8. Partnership with Perso Audit Bureau

Starting in October 2019, ASPI has been working with AGES Systems Gelderfarenit Pte Ltd to conduct an audit of the NSICCS card bureau.





Kilas Balik Kegiatan 2019

2019 Flashback Activities



Grand Launching/Peresmian QRIS
17 Agustus 2019



Grand Launching/Peresmian QRIS
17 Agustus 2019



Merchant Gathering, Jakarta
11 September 2019



Piloting QRIS BPD Bali
November 2019



Merchant Gathering, Makassar
20 November 2019



Production Trial Run (PTR) QRIS CPM
27 November 2019



Merchant Gathering, Yogyakarta
11 Desember 2019



Blueprint Sistem Pembayaran
Indonesia 2025



Sosialisasi QRIS di media TV

Rencana Kegiatan ASPI 2020

ASPI 2020 Activity Plan





Rencana Kegiatan 2020 2020 Activity Plan



Sebagai upaya untuk mengembangkan ekosistem pembayaran non tunai khususnya pembayaran digital, ASPI berencana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/program-program, dimana sebagian dari kegiatan tersebut dijalankan untuk mendukung inisiatif yang tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, yang antara lain:

1. Pengelolaan Standar

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan standar yang meliputi, tugas penyusunan, pengembangan dan pemeliharaan standar, maka standar spesifikasi yang telah dikeluarkan oleh ASPI antara lain QRIS dan NSICCS akan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan industri pembayaran, serta untuk memenuhi kebutuhan anggota.

a. QRIS Merchant Presented Mode (MPM) - domestik

Standard QRIS MPM yang telah diimplementasikan untuk transaksi pembayaran domestik di bulan Agustus 2019, akan dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan beberapa fitur untuk mengakomodasi transaksi:

- pemindahan dana (fund transfer) antar rekening,
- Tarik tunai (withdrawal/cash-out)
- Setor tunai (deposit/cash-in)

Pengembangan dilakukan untuk memperluas pasar dengan membuka kesempatan bagi masyarakat unbanked dan UMKM untuk masuk kedalam sistem keuangan dan ekonomi formal melalui layanan pembayaran digital.

b. QRIS Merchant Presented Mode (MPM) – international

Pengembangan ini akan dilakukan untuk memfasilitasi transaksi ke and dari luar negeri (outbound/inbound transaction) untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi turis mancanegara, peziarah serta pekerja migran.

As an efforts to develop cashless ecosystem, particularly in digital payment, ASPI plans to conduct activities/programmes in which part of it is to support the initiatives in the Indonesian Payment System Blueprint, such as:

1. Management of Standard

In executing the management of standards function which cover organizing, developing, and maintaining standards, the specification standards issued by ASPI include QRIS and NSICCS will be further enhanced to align with the development of technology and the growth of payment system as well as to fulfill the needs of the members.

a. QRIS Merchant Presented Mode (MPM) – Domestic

QRIS MPM standards which has been implemented for domestic payment transactions in August 2019, will be further enhanced with few additional features to accommodate:

- *Fund transfer between accounts*
- *Cash withdrawals*
- *Cash deposit*
- *Such development is to be implemented to expand the market coverage by opening the possibilities for unbanked communities and UMKM to enter into the payment system and formal financial economy through digital payments.*

b. QRIS Merchant Presented Mode (MPM) – Intenational

This development will be implemented to facilitated outbound/inbound transaction to provide convenience for overseas tourist, pilgrimage, and overseas workers to do transaction.

c. QRIS Consumer Presented Mode (CPM)

QRIS CPM akan memberikan pilihan dan pengalaman belanja yang berbeda kepada pengguna disamping meningkatkan penetrasi belanja masyarakat serta memberikan kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan sehingga menawarkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Implementasi di targetkan pada kuartal ke-4 tahun 2020.

2. Standarisasi Open API

Open Application Programming Interface (API) diharapkan dapat mendorong dan mempercepat transformasi digital serta membangun sinergi antara bank dengan perusahaan Fintech. Lebih jauh juga API akan menciptakan level playing field yang setara antara bank dan Fintech sehingga membuka kesempatan bagi pelaku industri untuk berinovasi dan berkompetisi ditengah arus digitalisasi ekonomi dan keuangan yang bergerak cepat.

ASPI akan diberikan kepercayaan untuk mengejawantahkan inisiatif Bank Indonesia tersebut melalui penyusunan Standar Open API bersama-sama dengan perwakilan pelaku industri.

3. Standardisasi Fast Payment dan Interface Pembayaran

Sejalan dengan rencana Bank Indonesia untuk mengembangkan Fast Payment, maka ASPI akan mengkaji kebutuhan akan pengembangan standarisasi message format transaksi payment credit untuk mendukung implementasi Fast Payment bersama dengan pengembangan standar Proxy ID dan standarisasi interface pembayaran untuk memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas.

4. Perluasan Layanan GPN

Alat pembayaran non-tunai berbasis kartu telah mengalami kemajuan dan perubahan yang cukup signifikan dengan beralihnya kartu contact menjadi contactless. Oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap NSICSS yang saat ini masih mengacu pada standar contact EMV versi 4.1.

Kajian awal telah dilakukan bersama-sama dengan functional test laboratory dan kajian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam

c. QRIS Consumer Presented Mode (CPM)

QRIS CPM will give the options and different shopping experience to the consumers in addition to increasing the public penetration for shopping as well as to give convenience in development and maintenance to offer higher efficiency. The implementation is targeted on the 4th quarter 2020.

2. Open API standardization

Open Application Programming Interface (API) is expected to push, drive and accelerate digital transformation as well as to build the synergies between banks and fintech company. Moreover, API will create same level playing field between bank and fintech so as to open the opportunity for the industry to innovate and compete in the digital economy stream and fast-moving financials digitization.

ASPI will be given the trust to embody Bank Indonesia's initiatives through the development of Open API, together with the representatives from the industry.

3. Standardization of Fast Payment and Payments Interface

Along with Bank Indonesia's plan to develop Fast Payment, ASPI will review the needs for Credit Transaction Format message standardization to support Fast Payment together with the development of Proxy ID standard and the standardization of payment interface to ensure interconnection and interoperability.

4. Expansion of GPN

Card-based non-cash payment transaction has been progressing and the significant changes is the migration from contact to contactless. It is therefore necessary to review on NSICCS which currently still refer to standard contact EMV version 4.1.

Preliminary studies have been conducted together with the functional test laboratory and the study will continue to be carried out in the

tahun 2020 untuk melihat kemungkinan ditingkatnya fungsi NSICCS untuk mengadopsi dual interface – contact & contactless.

5. Sosialisasi dan Pelatihan

Di tahun 2020 ASPI akan tetap melanjutkan kegiatan Training kepada anggota ASPI untuk familiarisasi produk standar yang dikeluarkan oleh ASPI.

6. Key Management and Certificate Authority (CA)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengamanatkan ASPI untuk mengelola fungsi Key Management, maka serah terima pengelolaan fungsi key management sebagai certificate authority dari ke-3 Perusahaan Switching (PT Alto Network, PT Artjasa Pembayaran Elektronik, dan PT Rintis Sejahtera) kepada ASPI dijadwalkan akan dilakukan dalam Q3 tahun 2020.

7. Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI)

Beberapa Ketentuan ASPI (KASPI) yang masih dalam proses pembahasan dan diharapkan dapat segera di selesaikan di tahun 2020:

a. KASPI Pengalihan Tanggung Jawab (Liability Shift).

KASPI Liability Shift adalah ketentuan yang mengatur tentang pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadi penyalahgunaan kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang dipalsukan, hilang, atau dicuri. Dalam hal tersebut diatas terjadi, maka tanggung jawab atas kerugian yang mungkin ditimbulkan, akan beralih kepada pihak yang belum menerapkan teknologi chip. KASPI Liability Shift diharapkan dapat mendorong percepatan migrasi kartu ATM dan/atau Debit dan juga terminal ATM & EDC ke teknologi berbasis chip, untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan dan sekaligus meminimalisir resiko.

year 2020 to see the possibility of the NSICCS function to adopt dual interface – contact & contactless.

5. Socialization and Training

In 2020 ASPI will continue with the training program to ASPI members to familiarize product standard issued by ASPI.

6. Key Management and Certificate Authority (CA)

In accordance with the provisions of Bank Indonesia which mandated ASPI to manage the function of Key Management, the handover process of key management functions as certificate authority from the 3 switching companies (PT Alto Network, PT Artajasa Pembayaran Elektronik, and PT Rintis Sejahtera) to ASPI is scheduled on 3rd Quarter 2020.

7. Indonesian Payment Association's Rules

Several provisions of ASPI (KASPI) are still in the process of discussion and expected to be completed immediately in the year 2020:

a. KASPI Liability Shift

KASPI liability shift is the rules that regulates the parties responsible for misuse ATM and/or debit card that is forged, lost or stolen. In this case such incident happened, the liability of the losses which may occur will shift to the party who have not implemented chip technology. KASPI Liability Shift is expected to boost the acceleration of the migration of ATM and/or Debit cards and also ATM terminals & EDC to Chip-based technology, to avoid the occurrence of crimes and at the same time minimizing risk.



b. KASPI Securities Scripless Settlement System (S4)

KASPI akan mengatur hal-hal yang memerlukan jabaran lebih lanjut atau yang belum diatur dalam peraturan Bank Indonesia terkait dengan penyelesaian transaksi sekuritas yang di proses melalui sistem BI-RTGS S4.

c. KASPI Gesek Tunai

Sebagaimana penjelasan Bank Indonesia dalam Sosialisasi Ketentuan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), kartu kredit digunakan sebagai alat bayar oleh karenanya melarang pihak merchant untuk melakukan transaksi Gesek Tunai. Konsep peraturan masih dalam proses pembahasan dengan Bank Indonesia dan diharapkan dapat dikeluarkan dalam tahun 2020.

8. Pengembangan Website ASPI

Dengan bertambahnya tugas, cakupan, dan aktivitas ASPI, maka diperlukan pengembangan website ASPI. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan anggota ASPI untuk mendapatkan informasi dan berita sehubungan dengan aktivitas ASPI serta pengiriman laporan secara elektronik.

9. ASPI Executive Gathering

Kegiatan Pertemuan Anggota (Executive Gathering) merupakan salah satu agenda rutin ASPI dengan tujuan mengundang perwakilan anggota selaku manajemen senior dari setiap anggota ASPI. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka mempererat hubungan kerja sama antara ASPI dengan anggotanya serta meningkatkan kolaborasi antar anggota ASPI maupun dengan pihak regulator.

b. KASPI on Securities Scripless Settlement System (S4)

This KASPI will regulate matters that requires further elaboration or have not been regulated in the Bank Indonesia regulation related to settlement of securities transaction process through BI-RTGS S4.

c. KASPI Cash Swipe

As per the explanation from Bank Indonesia regarding the socialization on card-based payment instrument, credit card is intended for payment instrument, therefore merchant is prohibited from performing cash swipe transaction (e.g using credit card to withdraw cash from merchant). The concept of such rules is still under discussion and expected to be issued in 2020.

8. Development of ASPI Website

With the increase of ASPI's role, scope, and activities, it is necessary to further enhanced ASPI's website to facilitate ASPI members in obtaining information and news related to ASPI activities and the submission of reports electronically.

9. ASPI Executive Gathering

The Executive Gathering is one of the routine agenda of ASPI with the aim of inviting member representatives as senior management of each member of ASPI. This meeting was held in order to strengthen the cooperation between ASPI and its members and improve the collaboration between the ASPI members and regulatory authorities.



10. Rapat Umum Anggota (RUA) 2020

Rapat Umum Anggota ASPI akan diadakan pada pertengahan tahun 2020 untuk menyampaikan laporan atas kegiatan dan keuangan ASPI untuk tahun buku 2019 serta laporan tugas pengawasan Badan Pengawas atas kinerja ASPI.

11. Review Keanggotaan ASPI

Keterwakilan industri dalam keanggotaan ASPI menjadi semakin penting sejalan dengan peran PJSP anggota ASPI dalam mendukung implementasi blueprint Bank Indonesia 2025.

Pada tahun 2020 mendatang, ASPI berencana melakukan review terkait keanggotaan ASPI. Hal tersebut dilakukan dengan menimbang perkembangan industri sistem pembayaran di Indonesia dan bertambahnya perusahaan baru (seperti Payment Gateway, Merchant Aggregator dll) yang ikut berpartisipasi dalam tatanan sistem pembayaran.

10. 2020 Members General Meeting (RUA)

Members General Meeting ASPI will be held in mid-2020 to share the report on ASPI's activities and financials for the fiscal year ending 2019, as well as to share the report on the oversights of the Supervisory Board on ASPI's performance.

11. Review of ASPI Membership

The representation from industry in ASPI membership is increasingly important in line with the role of ASPI members in supporting the implementation of Bank Indonesia Blueprint 2025.

In 2020, ASPI plans to conduct review on its membership. This will have to be done considering the development in the payment industry in Indonesia and the growth of new companies (such as Payment Gateway, Merchant Aggregator, etc) who participated in the payment system ecosystem.



Laporan Keuangan

Financial Statements



ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan – Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
Neraca	1
Laporan Perubahan Aset Bersih	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4 – 12

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama | : Anggoro Eko Cahyo |
| Alamat kantor | : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Gedung BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Cimandiri V FF 3/22, Bintaro
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten |
| Nomor telepon | : 021-5728031 |
| Jabatan | : Ketua Umum |
| Nama | : Sigit Prastowo |
| Alamat kantor | : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Gedung BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Vila Dago H-34 No.3
RT. 007/022, Benda Baru, Pamulang
Tangerang Selatan |
| Nomor telepon | : 021-80655555 |
| Jabatan | : Bendahara |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
2. Laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Pengurus,
Jakarta, 27 Maret 2020



ASPI
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Anggoro Eko Cahyo
Ketua Umum



ASPI
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Sigit Prastowo
Bendahara



Menara Kadin Indonesia 9th Floor

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 kav.2-3

Jakarta 12950 - Indonesia

Phone : (62-21) 5274426 (Hunting)

Fax : (62-21) 5274435, 8305901

E-mail : info@inpact.id

Website : inpact.id

Laporan Auditor Independen

No. 00025/2.1235/AU.2/11/1018-7/1/III/2020

Pengurus

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2019, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelas lainnya.

Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standard Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup kuat dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini Audit

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

TASNIM, FARDIMAN, SAPUAN, NUZULIANA, RAMDAN & REKAN
No. Izin Kantor No. 642/KM.1/2018



Yana Nuzuliana, CA, CPA, BPP
Surat Izin Praktik Akuntan Publik No. AP. 1018

27 Maret 2020

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NERACA

31 Desember 2019 Dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3	17.604.713.155	7.915.723.996
Piutang iuran	4	221.000.000	529.000.000
Piutang lain lain		555.577	229.090.909
Pajak dibayar dimuka	9a	421.636.579	290.516.810
Jumlah Aset Lancar		18.247.905.311	8.964.331.715
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 676.282.293 tahun 2019 dan Rp 443.116.898 tahun 2018	5	944.675.633	1.177.841.028
Aset tak berwujud	6	806.464.834	956.489.709
Jaminan	7	430.806.000	418.266.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.181.946.467	2.552.596.737
JUMLAH ASET		20.429.851.778	11.516.928.452
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Biaya yang masih harus dibayar	8	1.339.960.730	2.915.626.709
Hutang pajak	9b	2.533.226.711	704.806.624
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.873.187.441	3.620.433.333
JUMLAH KEWAJIBAN		3.873.187.441	3.620.433.333
ASET BERSIH		16.556.664.337	7.896.495.118
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		20.429.851.778	11.516.928.452

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN	10	22.393.287.941	22.153.549.903
BEBAN USAHA			
Beban proyek	11	(2.003.212.126)	(14.786.078.207)
Beban administrasi dan umum	12	(9.427.883.117)	(6.278.233.774)
Jumlah Beban Usaha		(11.431.095.243)	(21.064.311.981)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga		418.607.310	271.883.310
Beban lain-lain		(262.607.597)	(4.244.043)
Penghasilan lain-lain - bersih		155.999.713	267.639.267
KENAIKAN ASET BERSIH		11.118.192.411	1.356.877.190
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	9c	(2.458.023.193)	(305.548.257)
KENAIKAN ASET BERSIH SETELAH PAJAK		8.660.169.218	1.051.328.933
ASET BERSIH AWAL PERIODE		7.896.495.118	6.845.166.186
ASET BERSIH AKHIR PERIODE		16.556.664.337	7.896.495.118

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak	8.660.169.218	1.051.328.933
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	233.165.394	192.558.900
Amortisasi	150.024.875	107.195.750
Perubahan aset bersih:		
Piutang usaha	308.000.000	(359.000.000)
Piutang lain lain	228.535.332	(229.090.909)
Pajak dibayar dimuka	(131.119.769)	(290.516.810)
Jaminan	(12.540.000)	(294.690.000)
Hutang pajak	1.828.420.087	609.214.157
Beban yang masih harus dibayar	(1.575.665.979)	2.822.203.110
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	9.688.989.159	3.609.203.131
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	-	(1.069.223.094)
Aset tak berwujud	-	(1.057.485.459)
Penghapusan aset tak berwujud	-	57.486.459
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	-	(2.069.222.094)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	9.688.989.159	1.539.981.037
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	7.915.723.996	6.375.742.959
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	17.604.713.155	7.915.723.996

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM ASOSIASI

a. Pendirian Asosiasi

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ("Asosiasi") disingkat ASPI dalam bahasa Inggris disebut *The Indonesia Payment System Association* di singkat IPSA didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM No. 10 tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 28 Oktober 2011, untuk didaftarkan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan akta yang telah disusun kembali oleh Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta selaku protokol dari DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM., di bawah akta No. 21 tanggal 16 Desember 2011. Akta pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-227.A.H.01.06. Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011. Anggaran Dasar mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 11 tanggal 7 Agustus 2015 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000222.AH.01.08. Tahun 2016.

Asosiasi ini memiliki peran, tugas dan fungsi membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mewadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dalam industri sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran.

Asosiasi berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Graha Mandiri Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310.

b. Ruang Lingkup Asosiasi

Ruang lingkup dan kegiatan Asosiasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien dan menyusun ketentuan yang bersifat mikro dan teknis dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
- b. Wadah bagi kepentingan segenap pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang terkait dengan hubungan antar anggota ASPI maupun hubungan ASPI dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.
- c. Mitra Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran guna mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.

c. Keanggotaan Asosiasi

ASPI beranggotakan bank dan lembaga selain bank pelaku sistem pembayaran yang berbentuk badan hukum dan telah mendapat ijin dari Bank Indonesia atau instansi yang berwenang.

Pada tahun 2019 dan 2018, Asosiasi mempunyai anggota masing-masing sebanyak 149 anggota.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM ASOSIASI (Lanjutan)

d. Susunan dan Tugas Pengurus Asosiasi

Berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, No. 62 tanggal 27 Juni 2019 dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota tanggal 27 Juni 2019 tentang Perubahan Susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Asosiasi telah didaftarkan dan disetujui oleh seluruh Anggota ASPI sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000643.AH.01.08 tanggal 26 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Ketua Umum	: Anggoro Eko Cahyo	Anggoro Eko Cahyo
Wakil Ketua	: Rico Usthavia Frans	Rico Usthavia Frans
Sekjen	: Handayani	Handayani
Wakil Sekjen	: Abraham J. Adriaansz	Abraham J. Adriaansz
Bendahara	: Sigit Prastowo	Sigit Prastowo
Wakil Bendahara	: Soejanto Soetjijo	Dian Fithri Fadila Fachrudin
Ketua Komite I	: Ari Yuanto Asah	Ari Yanuanto Asah
Ketua Komite II	: Budiman Tanjung	Budiman Tanjung
Ketua Komite III	: Djumariah Tenteram	Djumariah Tenteram
Ketua Komite IV	: Eddy Hadijanto	Nizarwan Nawas
Ketua Komite V	: Timothy Utama	Timothy Utama
Ketua Komite VI	: YB Hariantono	Ery Punta Hendraswara
Ketua Komite VII	: Santoso	Santoso
Direktur Eksekutif	: Susiana Suhendra	Susiana Suhendra

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Asosiasi telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2019 disajikan berdasarkan SAK ETAP.

Manajemen Asosiasi berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2019 dengan angka komparatif 2018 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pembayaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Piutang Iuran

Piutang iuran disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Biaya perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur dengan model biaya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan perlengkapan kantor	4 tahun
Pengembangan ruang gedung yang disewa	8 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

e. Perpajakan

Asosiasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Asosiasi harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Asosiasi tidak mengakui adanya pajak tangguhan. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Asosiasi mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan baik pendapatan iuran anggota maupun pendapatan lain-lain didasarkan pada akrual basis, yaitu pendapatan suatu periode diakui sebagai pendapatan walaupun belum diterima pembayaran per kas. Beban diakui pada saat terjadinya.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	2019	2018
Kas	-	4.974.700
Bank		
PT Bank Negara Indonesia	13.018.350.847	4.033.749.203
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	609.240.183	564.741.426
PT Bank Central Asia Tbk	594.675.390	96.065.697
Jumlah Bank	14.222.266.420	4.694.556.326
Deposito berjangka		
PT Bank DKI	2.660.220.175	2.524.041.203
PT Bank CIMB Niaga Syariah	722.226.560	692.151.767
Jumlah Deposito berjangka	3.382.446.735	3.216.192.970
Jumlah	17.604.713.155	7.915.723.996
Tingkat suku bunga per tahun	4,35% - 5,40%	4,48% - 4,50%

4. PIUTANG IURAN

	2019	2018
MasterCard World Wide	50.000.000	50.000.000
Standard Chartered Bank	35.000.000	35.000.000
PT BPR Karyajatnika Sadaya	15.000.000	15.000.000
PT Cardsindo Tiga Perkasa	-	308.000.000
Lainnya	121.000.000	121.000.000
Jumlah Piutang Iuran	221.000.000	529.000.000

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. ASET TETAP

	2019			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	452.459.136	-	-	452.459.136
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	1.168.498.790	-	-	1.168.498.790
Jumlah	1.620.957.926	-	-	1.620.957.926
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	153.532.435	87.103.046	-	240.635.481
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	289.584.463	146.062.349	-	435.646.812
Jumlah	443.116.898	233.165.394	-	676.282.293
Nilai Buku	1.177.841.028			944.675.633
	2018			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	260.236.265	252.638.096	60.415.225	452.459.136
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	358.113.790	810.385.000	-	1.168.498.790
Jumlah	618.350.055	1.063.023.096	60.415.225	1.620.957.926
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	150.568.090	63.379.570	60.415.225	153.532.435
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	160.405.133	129.179.330	-	289.584.463
Jumlah	310.973.223	192.558.900	60.415.225	443.116.898
Nilai Buku	307.376.832			1.177.841.028

Beban penyusutan sebesar Rp 233.165.394 dan Rp 192.558.900 pada tahun 2019 dan 2018 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 12)

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET TAKBERWUJUD

		2019		
		Saldo awal	Penambahan	Pengurangan
		Saldo akhir		
Harga Perolehan				
Perangkat lunak	1.100.099.000	-	-	1.100.099.000
Akumulasi Penyusutan				
Perangkat lunak	143.609.291	150.024.875	-	293.634.166
Nilai Buku	956.489.709			806.464.834

		2018		
		Saldo awal	Penambahan	Pengurangan
		Saldo akhir		
Harga Perolehan				
Perangkat lunak	93.900.000	1.006.199.000	-	1.100.099.000
Akumulasi Penyusutan				
Perangkat lunak	36.413.541	107.195.750	-	143.609.291
Nilai Buku	57.486.459			956.489.709

Aset tidak berwujud memiliki umur manfaat selama 8 tahun dengan menggunakan tarif 12,5 % dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

7. JAMINAN

	2019	2018
Sewa	421.806.000	409.266.000
Telepon	9.000.000	9.000.000
Jumlah	430.806.000	418.266.000

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2019	2018
EAG	1.293.525.226	-
Pengembangan Spesifikasi NSICCS	-	2.863.636.363
Jasa profesional	-	40.000.000
Lain-lain	46.435.504	11.990.346
Jumlah	1.339.960.730	2.915.626.709

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2019	2018
PPN	421.636.579	290.516.810

b. Hutang Pajak

	2019	2018
PPh pasal 4 (2)	27.930.000	26.790.000
PPh pasal 21	153.035.891	143.090.035
PPh pasal 23	99.936.459	229.378.332
PPh pasal 25	25.462.354	-
PPh pasal 29	2.226.862.007	305.548.257
Jumlah hutang pajak	2.533.226.711	704.806.624

c. Pajak Kini

	2019	2018
Kenaikan aset bersih	11.118.192.411	1.356.877.190
Beda tetap		
Beban pengobatan	133.635.790	180.358.193
Beban pulsa telepon selular	6.295.500	-
Penyusutan aset tetap	491.125	-
Pendapatan bunga bank dan deposito	(366.145.014)	(266.139.905)
BPJS	-	76.853.127
Beban lain - lain	119.870.603	22.737.500
Penghasilan kena pajak	11.012.340.415	1.370.686.105
Pembulatan	11.012.340.000	1.370.686.000

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Kini (Lanjutan)

	2019	2018
Perhitungan taksiran pajak penghasilan		
Fasilitas	2.360.494.454	296.985.938
Tanpa fasilitas	8.651.845.546	1.073.700.062
Jumlah pendapatan kena pajak	11.012.340.000	1.370.686.000
Beban pajak		
Fasilitas	295.061.807	37.123.242
Tanpa fasilitas	2.162.961.386	268.425.015
Jumlah beban pajak kini	2.458.023.193	305.548.257
Kredit pajak		
PPh pasal 23	2.000.000	-
PPh pasal 25	229.161.186	-
Jumlah Kredit Pajak	231.161.186	-
Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak	2.226.862.007	305.548.257

10. PENDAPATAN

	2019	2018
MDR debit	12.441.787.941	8.488.554.903
Iuran anggota	5.327.500.000	4.984.995.000
NSICC specification	2.460.000.000	7.520.000.000
Fungsi sertifikasi	2.164.000.000	1.160.000.000
Jumlah	22.393.287.941	22.153.549.903

11. BEBAN PROYEK

	2019	2018
Biaya Executive Annual Gathering	1.293.525.226	260.216.300
Biaya Rapat Urusan Anggota	361.001.900	105.167.339
Pengembangan spesifikasi NSICCS	308.000.000	14.318.181.818
Biaya Seminar	34.085.000	95.742.850
Lainnya	6.600.000	6.769.900
Jumlah	2.003.212.126	14.786.078.207

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2019	2018
Gaji dan upah	4.287.725.158	4.014.073.479
Jasa professional	2.498.357.540	98.976.996
Sewa	1.117.200.000	1.172.622.750
Penyusutan (Catatan 5)	233.165.394	192.558.900
Perjalanan dinas	193.866.606	71.665.334
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	183.001.280	76.853.127
Amortisasi (Catatan 6)	150.024.875	107.195.750
Alokasi kesehatan	133.635.790	180.358.193
Internet	81.402.261	55.844.023
Rapat kantor	71.705.288	106.409.077
Alat tulis dan kebutuhan kantor	68.086.121	46.870.800
Pengiriman surat dan dokumen	37.548.645	45.434.053
Pemeliharaan	36.179.637	24.991.647
Transportasi	26.599.900	18.497.500
Telepon	19.966.785	14.843.785
Lain-lain	289.417.837	51.038.359
Jumlah	9.427.883.117	6.278.233.774

13. LIABILITAS KONTINJENSI

Asosiasi tidak mempunyai liabilitas kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2019.

14. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Asosiasi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan terlampir yang telah diselesaikan pada tanggal 27 Maret 2020.
